



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA

RENCANA KERJA PERUBAHAN (RENJA-P) TAHUN 2017



DINAS P2KUKM
KAB.LUWU UTARA

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT atas Berkat Rahmat, Taufiq dan Hidayah-Nya jualah sehingga Rencana Kerja (RENJA-P) Dinas Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Tahun Anggaran 2017 dapat selesai.

Rencana Kerja Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM adalah merupakan dokumen perencanaan yang disusun untuk periode 2017, yg memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang didasarkan aspirasi masyarakat yang terinventarisir melalui musrenbang yang berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun. Renja-P Tahun 2017 merupakan pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Luwu Utara yang mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan RENSTRA Periode Tahun 2016-2021.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih terdapat kekurangan, olehnya itu kritik dan saran yang sifatnya membangun dari pihak yang terkait selalu kami harapkan untuk kesempurnaan laporan ini dimasa akan datang. Dan semoga laporan ini berguna bagi pihak yang membutuhkan khususnya bagi Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Luwu Utara. Terima kasih.

Masamba, 2017
KEPALA DINAS,

Drs. H.MUSLIM MUCHTAR,M.Si
Pangkat :Pembina Utama Muda
NIP :19671212 198908 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum.....	2
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan	5
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA-P SKPD TAHUN LALU	8
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja-P dan Capaian Renstra Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM.....	8
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM	18
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM.....	26
2.4. Riview Terhadap Rancangan Awal RKPD	30
2.5. Penelaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	37
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN.....	41
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	41
3.2. Tujuan dan Sasaran Pembangunan.....	43
3.3. Program dan Kegiatan	65
BAB IV PENUTUP.....	74
LAMPIRAN – LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Rekapitulasi Evaluasi Pelaksanaan Renja Perubahan dan Pencapaian Renstra Dinas Koperindag s/d THN 2017 Kabupaten Luwu Utara	9
Tabel 2.	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Luwu Utara	24
Tabel 3.	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD-P Tahun 2017 Kabupaten Luwu Utara	32
Tabel 4.	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2017 Kabupaten Luwu Utara	38
Tabel 5.	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Tahun 2017 dan Perkiraan Maju Tahun 2018 Kabupaten Luwu Utara	66

**BAB. I
PENDAHULUAN**

1.1. Latar Belakang

Terwujudnya Rencana Kerja Satuan Pemerintah Daerah (SKPD) merupakan prasyarat bagi setiap Satuan Kerja Pemerintah Daerah untuk memudahkan pengimplementasian dari penyusunan rencana strategis pada kurun waktu tertentu. Dalam rangka itu diperlukan penerapan system perencanaan yang matang, jelas dan realistis, sehingga pelaksanaan program kerja masing-masing Satuan Kerja Pemerintah Daerah dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, efektif, efisien baik dari sisi penganggaran maupun sasaran tiap-tiap program kegiatan.

Rencana Kerja Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Luwu Utara Tahun 2017 adalah dokumen perencanaan Dinas P2KUKM Kabupaten Luwu Utara untuk periode 2017, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan antara lain aspirasi masyarakat yang terinventarisir oleh Dinas , melalui musrembang dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun. Renja-P Perubahan Dinas P2KUKM merupakan pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas P2KUKM Kabupaten Luwu Utara.

Ruang lingkup Rencana Kerja Perubahan (RENJA-P) adalah pelaksanaan kegiatan Dinas P2KUKM dalam 1(satu) tahun dengan memperhitungkan faktor-faktor penentu keberhasilan yang dicapai, RENJA-P Dinas P2KUKM Kabupaten Luwu Utara mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016-2021 dan RENSTRA Dinas P2KUKM Kabupaten Luwu Utara 2016-2021

Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM , maka perlu penyusunan Rencana Kerja Perubahan (Renja-P),hal ini dimaksudkan sebagai kerangka perencanaan dan penganggaran tahunan, yaitu sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahunan.



1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renja-P SKPD dilandasi Dasar Hukum sebagai berikut :

- (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- (2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No 104, Tambahan Negara Republik Indonesia No. 4421);
- (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5587);
- (4) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- (5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4700);
- (6) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4725);
- (7) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 No. 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4578);
- (8) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 No. 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4737);
- (9) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah;



Rencana Kerja Perubahan(RENJA-P) Tahun 2017

- (10) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- (11) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 No. 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4585);
- (12) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 No. 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4664);
- (13) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- (14) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
- (15) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- (16) Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
- (17) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- (18) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- (19) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.



Rencana Kerja Perubahan(RENJA-P) Tahun 2017

- (20) Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011-2031;
- (21) Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Luwu Utara Tahun 2005-2025;
- (22) Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Utara Tahun 2010-2015;
- (23) Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 Nomor 14);
- (24) Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 96 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 Nomor 96);
- (25) Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 29 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nomor 29).

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud dibuatnya Renja-P SKPD Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM adalah merupakan penjabaran RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Olehnya itu Renja-P SKPD Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Berpedoman pada Renstra SKPD dan mengacu pada rancangan awal RKPD-P.



Rencana Kerja Perubahan(RENJA-P) Tahun 2017

2. Tujuan

1. Mengoptimalkan peran dan fungsi perencanaan dalam pembangunan daerah;
2. Mewujudkan perencanaan pembangunan yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran dan berkesinambungan
3. Untuk meningkatkan pelayanan masyarakat yang lebih berdaya guna dan berhasil guna sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi dan tujuan instansi dalam rangka mendukung keberhasilan pembangunan Pemerintah Daerah.
4. Memberikan arahan mengenai kebijakan umum dan program pembangunan daerah selama 1 tahun kedepan.

1.4. Sistematika Penulisan

Renja-P SKPD Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB. I PENDAHULUAN

Bab ini berisi :

- 1.1. Latar Belakang : Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja-P SKPD, proses penyusunan Renja-P SKPD

BAB. II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA-P DINAS PERDAGANGAN PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja-P Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM.

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja-P Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM tahun lalu (Tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (Tahun n-1) pada APBD tahun berjalan yang seharusnya



pada waktu penyusunan Renja-P Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM sudah disahkan.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM.

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan pada Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM.

Bab ini berisi identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kab. Luwu Utara, telaahan terhadap Visi, Misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, telaahan terhadap Renstra Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Selatan, dan penentuan Isu-isu Strategis;

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai

1. Membandingkan antara rancangan awal RKPD-P dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD-P

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam Bab ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan berdasarkan hasil pengumpulan informasi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang.



BAB. III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Bab ini memuat Penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja-P Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM.

Bab ini memuat tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra.

3.3. Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai :

1. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan
2. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.
3. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD-P, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB. IV. PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa :

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- c. Rencana tindak lanjut.



BAB. II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA-P SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja-P Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM.

Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja-P Evaluasi pelaksanaan Renja-P Dinas P2KUKM tahun lalu (Tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), yang mengacu pada APBD Tahun 2015 dan target Tahun 2016. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Dinas P2KUKM berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja-P Dinas P2KUKM tahun-tahun sebelumnya.

Berdasarkan Tabel 1. Hasil evaluasi Capaian kinerja Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM berdasarkan Pengukuran indikator kinerja Progran out come dan kegiatan tahun 2017 sebesar 75.60 %, capaian Renstra outcome hingga tahun 2017 sebesar 48,81 % dengan kategori capaian sangat tinggi. Persentase pencapaian kinerja Dinas P2KUKM Out put tahun 2017 sebesar 98,11 %, capaian kinerja berdasarkan target renstra out hingga tahun 2017 sebesar 75,06% (sangat tinggi). Dalam mendukung pelaksanaan pencapaian target indikator kinerja, Dinas P2KUKM mendapatkan alokasi dana APBD-P untuk tahun anggaran 2017 sebesar Rp. 6.098.493.800,- (Enam Miliar Sembilan Puluh Delapan Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Rupiah) yang telah direalisasikan sebesar Rp. 6.088.493.000,- (Enam Miliar Delapan Puluh Delapan Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Rupiah) sedangkan dana APBN melalui Dana Tugas Pembantuan Sebesar Rp. 12.000.000.000,- (Dua Belas Miliar Rupiah) dengan realisasi Rp. 11.956.190.000,-. Berdasarkan Hasil evaluasi kegiatan yang diusulkan pada tahun 2017 tidak semua kegiatan bisa dilaksanakan karena keterbatasan anggaran APBD olehnya itu kegiatan yang bisa dilaksanakan adalah kegiatan skala prioritas saja yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, mengurangi ketimpangan kesenjangan sosial, mengurangi angka kemiskinan, dan peningkatan lapangan kerja.



**REKAPITULASI EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERUBAHAN DINAS KOPERINDAG DAN PENCAPAIAN RENSTRA DINAS KOPERINDAG S/D THN 2017
KABUPATEN LUWU UTARA**

No	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME DAN KEGIATAN OUTPUT)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s/d Triwulan IV Tahun 2016			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s/d Triwulan IV Tahun 2017			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Koperindag s/d Tahun Berjalan (2017)		Catatan	JUMLAH		KETERANGAN			
					Target Renja Koperindag Thn 2016	Realisasi Renja Koperindag Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Koperindag Thn 2017	Realisasi Renja DP2KUK M Tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan Tahun berjalan Tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)Capaian sampai thn 2017		PROGR AM	KEGIA TAN	JLH KEGIATAN			JLH KEGIATAN TDK TERLAKSANA
																REND AH	SESUAI/TERCA PAI	MELEBI HI	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11=(10/9)	11= (7+10)	12 =(11/4)	13	14	15	kol (10) <26,00	kol (10) 26,40-40.00	Kol (10) >40	Kol (10) 0
	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Layanan Publik(Jumlah Persentase Jumlah Layanan/Total Layanan*100	100 %				100			100		100		1					
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat terkirim	12,000 pucuk		3000	3000	100	3,000	3,000	100	6,000	50			1			1	
2	Penyeediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah pembayaran tagihan telepon/internet	12 bln	12	12	12	100	12	12	100	12	100			1			1	
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan dinas yang dirawat	Jumlah kendaraan dinas yang dirawat	5 unit		5	5	100	5	5	100	5	100			1			1	
4	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Cleaning service	1 org	1	1	1	100	1	1	100	1	100			1			1	

5	Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	<i>Jumlah komponen alat-alat listrik yang dibeli</i>	20 jenis	20	20	20	100	20	20	100	20	100			1			1	
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	<i>Jumlah Koran berlangganan</i>	10 koran	10	10	10	100	10	10	100	10	100			1			1	
7	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar daerah	<i>Jumlah aparat yang mengikuti rapat koordinasi dan konsultasi</i>	52 Pegawai	52	52	52	100	52	52	100	52	100			1			1	
8	Penatausahaan Keuangan, Administrasi Kepegawaian, Ketatausahaan dan Asset Daerah	<i>Jumlah dokumen administrasi keuangan, kepegawaian, ketatausahaan dan asset</i>	4 dok	4	4	4	100	4	4	100	4	100			1			1	
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Layanan Publik(Jumlah Persentase Jumlah Layanan/Total Layanan*100	100 %				100			100		100			1				
9	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan kantor yang diadakan	25 unit	6	9	9	100	4	4	100	13	52			1			1	
10	Pengadaan Meubeler	Jumlah meubeler yang diadakan	42 unit	0	34	34	100	3	3	100	37	88.0952381			1			1	
11	Pemeliharaan rutin/berkala gedung	Jumlah gedung kantor yang dirawat	1 unit	1	1	1	100	1	1	100	1	100			1			1	
12	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dirawat	5 unit	3	5	5	100	5	5	100	5	100			1			1	

13	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terawat	15	unit	15	15	15	100	15	15	100	15	100			1			1	
	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur	80	%				100			100		100		1					
14	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	Jumlah mesin absensi yang diadakan	2	unit	0	1	1	100	1	1	100	2	100			1			1	
	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Tertib administrasi dan laporan tepat waktu sesuai SAP	100	%				100			100		100		1					
15	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Dokumen yang dilaporkan	2	dok	2	2	2	100	2	2	100	2	100			1			1	
16	Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah dokumen yang dilaporkan dan disinkronkan	8	dok	8	8	8	100	8	8	100	8	100			1			1	
	PROGRAM PENINGKATAN SUMBER DAYA APARATUR	Persentase Peningkatan Kualitas SDM aparat	85	%				100			100		42.307692		1					
17	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bimtek yang diikuti	52	Pegawai	8	8	8	100	14	14	100	22	42.30769231			1			1	

	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN	Jumlah Kunjungan Dalam Pelayanan Kedinasan	100	%	25	25	25	100	25	25	100		100		1					
18	Kunjungan Kerja Bersama Bupati/Wakil Bupati, DPRD/Muspid a/Pejabat Pemerintah Tingkat Atas/Unit kerja terkait	Jumlah pegawai yang melaksanakan kunjungan kerja	500	kali	100	100	100	100	185	185	100	285	57		1				1	
	PENCIPTAAN IKLIM USAHA KECIL MENENGAH YANG KONDUSIF	Persentase Pertumbuhan UMKM	35.25	%									28.25		1					
19	Penyusunan Kebijakan tentang Usaha Kecil Menengah	Jumlah Ranperda/Perda yang terbit	1	Ranperda	1	1	1	100	1	1	100	1	100		1				1	
20	Pengembang an Sarana Pemasaran Produk UMKM	Jumlah UMKM yang difasilitasi akses pemasaran melalui E- Comerce	250	UMKM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Tahun 2018 baru dilaksana kan	1	1				
	PENGEMBANG AN KEWIRAUSAH AAN DAN KEUNGGULAN KOMPETITIF UMKM	Persentase SDM Koperasi dan UMKM yang dilatih	17.66	%	15.97	16.1	15.89	98.696	16.25	16.1	99.0769	16.1	16.1		1			1		

21	Penyelenggara an Pelatihan Kewirausahaan	Jumlah SDM UMKM yang dilatih	270	UMKM	30	30	30	100	30	30	100	60	22.22222222			1		1		
	PENGEMBANG AN SISTEM PENDUKUNG USAHA BAGI UMKM	<i>Persentase UMKM yang mendapatkan fasilitas dari pemerintah, BUMD dan BUMN</i>	16	%	0	5	4.86	7	6.89	98.4286	6.89	6.89	6.89			1		1		
22	Pemantauan, Pengelolaan Penggunaan Dana Pemerintah Bagi UMKM	Jumlah UMKM	17000	UMKM	12700	12807	12800	99.9453	12870	12865	99.96115	12865	75.67647059			1	1			
23	Penyelenggara an Promosi Produk UMKM	Jumlah Produk UMKM yang di Promosikan	100	produk	18	20	20	100	20	20	100	40	40			1	1			
	PENINGKATA N KUALITAS KELEMBAGAA N KOPERASI	<i>Persentase Koperasi Aktif</i>	69.5	%	67,83	62	61.5	99.194	64	58.69	91.7031	58.69	58.69			1				
24	Pembinaan, Pengawasan, dan Penghargaan Koperasi Berprestasi	Jumlah koperasi yang mendapatkan pembinaan	205	Kop	258	244	259	106.148	238	238	100	238	16.09756098			1	1			
			195	Kop Aktif	175	180	152	84.4444	185	152	82.16216	152	77.94871795							
	PENINGKATA N KEMAMPUAN TEKNOLOGI INDUSTRI	<i>Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB</i>	4.89	%	4.55	4.57	4.57	100	4.6	4.57	4.57	4.57	4.57			1				

25	Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri	Jumlah IKM yang dilatih pengolahan yang berbasis pangan	252	IKM	52	50	50	100	50	50	100	152	60.31746032			1			1	
26	Pengembangan dan Pelayanan Teknologi Industri	Jumlah IKM yang mendapatkan pendampingan	120	IKM	15	20	20	100	25	25	100	60	50			1			1	
	PENINGKATAN KAPASITAS IPTEK SISTEM PRODUKSI	Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor industri	2.59	%	2.38	2.39	2.29	95.816	2.41	2.39	99.1701	2.39	2.39		1					
27	Pengembangan Kapasitas pranata pengukuran, standarisasi, pengujian dan kualitas	Jumlah IKM yang berstandarisasi sertifikasi halal	60	IKM	30	6	6	100	10	6	60	46	76.66666667			1			1	
28	Penguatan Kemampuan Industri Berbasis Teknologi	Jumlah IKM yang dilatih pengolahan pasca panen	352	IKM	292	0	0	0	30	30	100	322	91.47727273			1			1	

	PENGEMBANG AN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH	<i>Persentase Cakupan bina kelompok pengrajin = Jumlah kelompok pengrajin yang difasilitasi pemerintah dibagi jumlah kelompok pengrajin x 100 %</i>	33.47	%	21	23.5	23.75	101.06	25.5	30	30	100	30		1					
29	Fasilitasi Bagi Industri Kecil dan Menengah terhadap pemanfaatan sumber daya	Rasio IKM yang memenuhi kualifikasi untuk dibantu	58	klp IKM	9	10	10	100	10	7	70	29	50			1			1	
30	Pemberian Kemudahan Izin Usaha Industri Kecil dan Menengah	Jumlah Industri yang telah didata	350	IKM	100	60	60	100	60	60	100	220	62.85714286			1			1	
31	Fasilitasi Kerjasama Kemitraan Industri Mikro, Kecil dan Menengah Dengan Swasta	Jumlah IKM yang bekerjasama dengan pihak swasta	50	IKM	8	15	15	100	7	15	214.2857	30	60			1			1	
	PERLINDUNG AN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGA N	Persentase Peningkatan Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	95	%		20	19.87	99.35	25	25	25	25	25		1					

32	Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Permasalahan Pengaduan Konsumen	Jumlah Kasus/Masalah Konsumen yang terselesaikan	25	kasus	0	5	5	100	5	2	40	10	40			1		1		
33	Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa	Jumlah Barang kadaluarsa yang ditarik di pasaran	265	jenis	53	53	53	100	53	75	141.5094	159	60			1			1	
		Persentase penurunan barang kadaluarsa	50	%	0	10	10	0	5	5	100	15	30							
		Jumlah barang bersubsidi yang diawasi	8	jenis	8	8	8	100	8	8	100	8	100							
34	Operasionalisasi dan Pengembangan UPT Kemetropolitan Daerah	Jumlah Peralatan UTP Kemetropolitan yang ditera	10000	unit	2088	2550	1000	39.2157	2000	2000	100	5088	50.88			1			1	
			9	Kecamatan	3	3	3	100	3	3	100	9	100							
	PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal = Jumlah pedagang yang yang mendptkan binaan Pemda tahun n dibagi jumlah	12.5	%		10	9.9	99	10.5	10.71	102	10.2	10.2		1					
35	Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/Produk	Jumlah Pasar Tradisional yang dibangun	14	Pasar	4	2	2	100	2	3	150	8	57.14285714			1			1	

36	Pengembangan Pasar Lelang Daerah	Jumlah Pengusaha dan Kelompok Tani yang mengikuti Pasar lelang	60	poktan	10	10	10	100	10	10	100	30	50			1			1	
37	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Jumlah Data Pasar	47	Pasar	41	1	1	100	1	1	100	43	91.4893617			1			1	
		Jumlah Kebutuhan pokok yang didata	115	jenis	23	23	23	100	23	23	100	69	60							
		Jumlah pedagang yang terdata/dibina	10000	pedagang	4424	2000	2000	100	2000	2000	100	8424	84.24							
38	Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (Pasar Murah)	Jumlah Paket Pasar Murah	10000	paket	2000	2000	2000	100	2000	3892	194.6	5892	58.92			1			1	
CAPAIAN KINERJA OUT COME								92.87			75.60		48.29		15	38	5	3	32	0
CAPAIAN KINERJA OUT PUT								91.59			101.19		73.38				13.16	7.89	84.21	0.00

100.00%	91.00%	100.00%	Sangat Tinggi	40	36.4	40	Sangat Tinggi
	76.00%	90.00%	Tinggi		30.4	36	Tinggi
	66.00%	75.00%	Sedang		26.4	30	Sedang
	51.00%	65.00%	Rendah		20.4	26	Rendah
	=<	50.00%	Sangat Rendah		=<	20	Sangat Rendah

KEPALA DINAS,

Drs. H.MUSLIM MUCHTAR,M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19671212198908 1 002

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM

Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM belum memiliki SPM yang dikeluarkan oleh Kementerian Koperasi dan UKM RI, Kementerian Perindustrian RI, dan Kementerian Perdagangan RI, sehingga menjadi kendala bagi Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM dalam menentukan capaian kinerja pelayanan. Untuk itu dalam penentuan capaian kinerja yang digunakan hanya mengacu pada IKU/IKK.

Berdasarkan Tabel. 2, indikator fungsi pelayanan berdasarkan RPJMD 2016 – 2021 terdapat 3 sasaran dengan 10 indikator. Sasaran dan indikator tersebut merupakan penjabaran dari Misi Pertama dan Misi ketiga RPJMD.

1. Sasaran meningkatnya produktifitas koperasi dan UKM ada 2 indikator yaitu : Jumlah Koperasi Aktif dan Persentase usaha Mikro dan Kecil. indikator persentase koperasi aktif kondisi awal tahun 2016 adalah sebesar 61,02 % dan hingga tahun 2016 meningkat menjadi 61,5 % terjadi peningkatan koperasi aktif sebesar 0,48 %. Sedangkan realisasi capaian tahun 2017 sebesar 58,69% Terjadi penurunan sebesar 5,31% dari target 64 %. Hal ini disebabkan karena terkendala dengan Permenkop No: 10/Per/M.UKM/IX/2015 tentang kelembagaan koperasi. Dalam pasal 45 ayat 1 menyebutkan Menteri mendelegasikan pengesahan akta pendirian, perubahan AD, penggabungan, peleburan pembagian dan pembubaran koperasi kepada Deputy Bidang Kelembagaan, sedangkan pada ayat 2 menegaskan bahwa pengesahan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dapat dilakukan dengan sistem elektronik (sisminbhkop). Oleh karena itu setelah adanya permen tersebut pengurus Koperasi mengalami kendala dalam hal pengurusan BH koperasi sehingga ada beberapa koperasi yang terbentuk tahun 2016 dan tahun 2017 belum berbadan hukum dan belum bisa dicatat dalam buku register koperasi sebelum berbadan hukum dan belum dianggap sebagai koperasi aktif. Meskipun demikian animo masyarakat untuk berkoperasi sangat tinggi karena adanya perhatian Pemerintah pusat berupa reward terhadap koperasi yang



aktif dan berprestasi berupa bantuan penambahan modal dan kemudahan dalam pengajuan kredit modal usaha. Pembinaan yang cukup aktif dilakukan oleh dinas terkait dalam hal ini dinas P2KUKM selaku Pembina Koperasi di daerah berupa penyuluhan dalam rangka penyampaian syarat wajib sebagai koperasi aktif yaitu wajib untuk melakukan RAT setiap tahun. Selain itu juga dilakukan berbagai pelatihan terhadap pengelola Koperasi dalam rangka peningkatan SDM pengelola koperasi.

Indikator persentase usaha mikro dan kecil terhadap UMKM kondisi awal tahun 2015 sebesar 98,87 % hingga tahun 2016 meningkat menjadi 99,74 % terjadi kenaikan sebesar 0,87 % hal ini disebabkan karena terus meningkatnya pelaku usaha Usaha mikro dan kecil meskipun juga ada beberapa yang sudah gulung tikar karena kekurangan modal dan tidak mampu bersaing dengan Usaha mikro kecil lainnya. Berdasarkan hasil pemantauan dan pendataan Bidang Koperasi dan UKM tahun 2017 mengalami peningkatan jumlah pelaku usaha mikro dan kecil dengan mencapai 99,61 % dari target 98,97 % meskipun mengalami penurunan sebesar 0,13 % dari tahun 2016 tetapi melebihi dari target tahun 2017 sebesar 0,64%. Peningkatan ini seiring dengan adanya kebijakan pemerintah dengan memberikan kemudahan fasilitas kredit KUR dengan bunga yang sangat rendah dengan tanpa jaminan dan Kebijakan pemerintah tentang kemudahan pemasaran produk UMKM melalui retail modern dan pasar online.

Kegiatan Pendukung :

1. Pemantauan Pengelolaan Penggunaan dan Pemerintah bagi UMKM
2. Penyelenggaraan promosi produk UMKM
3. Penyusunan Kebijakan tentang Usaha Kecil Menengah
4. Sosialisasi kebijakan tentang Usaha Kecil Menengah
5. Pembinaan, Pengawasan, dan Penghargaan Koperasi Berprestasi

Prosentase proyeksi target hingga tahun 2018 mencapai 99,5 %.

2. Sasaran meningkatnya Nilai Perdagangan Barang dan Jasa terdiri dari 4 indikator yaitu : 1). Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB . 2). Net Ekspor antar



daerah, 3). Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal , 4). Jumlah Pasar tradisional yang terbangun.

Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB kondisi awal tahun 2015 8,54 % sedangkan tahun 2016 naik menjadi 9,31 % terjadi kenaikan sebesar 0,77 %. Untuk tahun 2017 belum bisa diberikan data karena berhubung pengelola data di kantor statistik belum bisa memberikan data sehingga capaian yang dilaporkan hingga tahun 2016. Peningkatan ini diakibatkan karena jumlah usaha perdagangan di kabupaten Luwu Utara meningkat seiring dengan masuk retail modern dan swalayan mini di kabupaten luwu utara, selain itu juga dipengaruhi meningkatnya nilai hasil pertanian, industri pengolahan dan jasa perdagangan lainnya sehingga nilai volume perdagangan juga meningkat. Proyeksi target hingga tahun 2017 mencapai 9,39 %

Net Ekspor antar daerah atas dasar harga berlaku tahun 2016 mencapai Rp. 119.309.060.000,- hal ini mengakibatkan pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan menjadi 29,11 % dan distribusi PDRB atas dasar harga berlaku sebesar 1,22 %. Tingginya ekspor antar daerah membuat komponen net ekspor total mengalami pertumbuhan dalam struktur pertumbuhan ekonomi Kabupaten Luwu Utara berdasarkan harga konstan. Ini didorong ekspor antar daerah yang tinggi sejalan dengan pertumbuhan industri pengolahan untuk pasar domestik.

Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal tahun 2017 sebesar 10,71 % dari target 10,5 % terjadi kenaikan sebesar 0.21 % dan naik 0,84 % dari tahun 2015 yang hanya mencapai 9,87 %. Jumlah pedagang yang mendapatkan pembinaan dan fasilitas dari Pemerintah terus meningkat hal ini disebabkan karena jumlah UMKM terus bertambah dan salah satu penyumbang terbesar dalam peningkatan PDRB disektor perdagangan adalah UMKM. Dan diperkirakan cakupan bina kelompok tahun berikutnya akan terus meningkat sejalan dengan bertambahnya UMKM.

Jumlah pasar yang dibangun tahun 2016 sebanyak 2 pasar yaitu pasar Sukamaju dan pasar Amassangan Kecamatan Malangke Barat yang bersumber



dari Dana Alokasi Khusus kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Sedang tahun 2017 jumlah pasar tradisional yang dibangun sebanyak 3 unit, yaitu Pasar Bone-Bone, Pasar Mulyerejo, Pasar Sabbang hingga tahun 2017 jumlah pasar tradisional yang dibangun sebanyak 5 unit.

Kegiatan Pendukung :

1. Pengembangan Pasar dan distribusi barang/produk
 2. Pengembangan pasar lelang daerah
 3. Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan
 4. Sosialisasi peningkatan penggunaan produk dalam negeri
3. Sasaran Meningkatnya Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah terdiri dari 4 indikator kinerja utama yaitu : 1.) Kontribusi sektor industri terhadap PDRB, 2.) Kontribusi Industri Rumah Tangga terhadap PDRB sektor Industri, 3.) Pertumbuhan Industri, 4.) Cakupan bina kelompok pengrajin.

Kontribusi sektor industri terhadap PDRB tahun 2016 sebesar 4,28 % naik 0,21 % dari tahun 2015 yang hanya mencapai 4,26 %. Untuk tahun 2017 belum bisa diberikan data karena terhubung pengelola data di kantor statistik belum bisa memberikan data sehingga capaian yang dilaporkan hingga tahun 2016. Industri pengolahan sebagai penyumbang terbesar dalam peningkatan PDRB disektor industri. Hal ini disebabkan karena hampir setiap tahun industri terus bertambah dan berkembang. Berdasarkan data BPS tahun 2016 PDRB disektor industri pengolahan menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku tahun 2016 adalah sebesar Rp. 419.453.870 sedangkan tahun 2015 hanya mencapai Rp. 370.552.290,-, terjadi kenaikan sebesar Rp. 48.901.580,-

Kontribusi Industri Rumah Tangga terhadap PDRB tahun 2016 mencapai 2,39 %. Untuk tahun 2017 belum bisa diberikan data karena terhubung pengelola data di kantor statistik belum bisa memberikan data sehingga capaian yang dilaporkan hingga tahun 2016. Industri rumah tangga akan terus berkembang seiring dengan pertumbuhan wirausaha baru. Industri rumah tangga dikabupaten luwu utara hanya kebanyakan berupa industri pangan rumahan yang hanya memasarkan produk usahanya secara lokal belum



bisa memenuhi pasaran secara nasional karena terbatas dengan peralatan dan permodalan. Diharapkan industri rumah tangga akan terus berkembang dan bisa dikategorikan sebagai industri kecil menengah.

Pertumbuhan industri di Kabupaten Luwu Utara tahun 2016 mencapai 11,71 % naik 1,7 % dari tahun 2015 yang hanya mencapai 10,01%. Untuk tahun 2017 pertumbuhan industri mengalami penurunan sebesar 3,35 % (hanya mencapai 7,8 % dari target 11,15 %). Penurunan ini disebabkan karena adanya alih fungsi industri dari komoditi nelam yang pada tahun 2016 pertumbuhannya sangat signifikan menurun karena banyak IKM yang bergerak dibidang pengolahan nelam gulung tikar akibat anjloknya harga nelam. Hal ini memicu pertumbuhan industri melemah/lambat .

Cakupan bina kelompok pengrajin merupakan perbandingan antara jumlah industri pengrajin yang difasilitasi oleh Pemerintah dengan Jumlah keseluruhan industri pengrajin. Persentase cakupan bina kelompok pengrajin tahun 2016 mencapai 23,75 % naik 0,01 % dari tahun 2015 yang mencapai 23,74%. Untuk tahun 2017 mencapai 30 % naik 4,5 % dari target 25,5 %. Perkembangan Industri pengrajin di Kabupaten Luwu Utara memang sangat rendah. Namun Industri kerajinan terus perhatian dari Pemerintah dan tetap dilakukan pembinaan sehingga akan terus berkembang. Lambatnya pertumbuhan industri kerajinan disebabkan karena animo masyarakat yang masih kurang terhadap industri kerajinan karena mereka beranggapan bahwa perputaran ekonomis industri pangan lebih cepat dari industri kerajinan yang butuh kreatifitas dan keahlian khusus.

Kegiatan Pendukung :

1. Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri
2. Pengembangan dan Pelayanan Teknologi Industri
3. Pengembangan kapasitas pranata pengukuran, standarisasi, pengujian dan kualitas.
4. Penguatan kemampuan industri berbasis teknologi



Rencana Kerja Perubahan(RENJA-P) Tahun 2017

5. Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya
6. Pemberian kemudahan izin usaha industri kecil dan menengah
7. Fasilitasi kerjasama kemitraan industri mikro, kecil dan menengah dengan swasta.
8. Penyediaan Sarana maupun Prasarana Kluster Industri.



Tabel 2
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS PERDAGANGAN
KABUPATEN LUWU UTARA

NO	TUJUAN	Sasaran	Indikator	Satuan	TARGET		REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI CAPAIAN		CATATAN ANALISA
					TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Meningkatkan Pertumbuhan, Produktifitas dan Pengembangan potensi pusat-pusat perekonomian	Meningkatnya Produktifitas Koperasi dan UMKM	Persentase koperasi aktif	%	62	64	61.5	58.69	66	68	
2			Persentase Usaha Mikro dan kecil terhadap UMKM	%	98.9	98.97	99.74	99.61	99.5	99.75	
3		Meningkatnya nilai perdagangan barang dan jasa	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	9.37	9.39	8.59	8.59*	9.41	9,45	
4			Net Ekpor antar Daerah	Rp	118.409.060	130,800,000	119.309.060	119.309.060*	145,900,200	165,900,250	
5			Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	%	10	10.5	9.9	10.71	11.25	11.55	

6			Jumlah Pasar tradisional yang dibangun	Pasar	2	2	2	3	2	2	
7		Meningkatnya Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah	Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB	%	4,57	4.6	4,28	4.28*	4.62	4.65	
8			Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor industri	%	2.3	2.15	2.14	2.14*	2.44	2.53	
9			Pertumbuhan Industri	%	10,2	11,15	11,71	7.8	11,7	12,1	
10			Cakupan bina kelompok pengrajin	%	23.5	25.5	23.75	30	27.5	29.5	

Catatan : * Data Sementara

KEPALA DINAS,

Drs. H.MUSLIM MUCHTAR,M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19671212198908 1 002

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perdagangan, Perindustrian Koperasi dan UKM.

Dalam pelaksanaan tugas sebagai salah satu Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM yang memberikan pelayanan serta pembinaan langsung kepada masyarakat maka dapat diketahui dan diidentifikasi beberapa permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM :

1. Bidang Koperasi dan UKM :

Masalah utama yang dihadapi bidang Koperasi dan UKM adalah :

- A. Masih Kurangnya pengetahuan Aparat dalam Pembinaan Koperasi dan UMKM. Hal ini menyebabkan sulitnya menilai atau mendiagnosa sehat tidaknya koperasi dan UMKM untuk menentukan seberapa besar perkembangan dan kemajuan koperasi dan UMKM tersebut. Penyebabnya adalah terbatasnya anggaran untuk melatih SDM aparat pembina koperasi.
- B. Masih rendahnya SDM Pengurus dan Pengelola Koperasi. Penyebabnya adalah rendahnya kesadaran pengurus dan pengelola koperasi untuk mengikutsertakan pengurusnya dalam pelatihan pengelolaan dan Manajemen koperasi.
- C. Belum adanya koperasi unggulan di setiap Kecamatan hal ini disebabkan karena koperasi yang ada di kabupaten luwu utara belum memenuhi kriteria koperasi unggulan yang dipersyaratkan utamanya dari segi kesehatan koperasi. Olehnya itu diperlukan pembinaan dan pemantauan terhadap kesehatan koperasi secara berkelanjutan.
- D. Belum maksimalnya peralatan dan Permodalan bagi UMKM, hal ini disebabkan karena sulitnya UMKM untuk mengakses permodalan karena Lembaga/Bank pemberi pinjaman masih mempersyaratkan agunan yang kadang belum sepenuhnya UMKM miliki. Selain itu para pelaku usaha (UMKM) masih selalu berharap bantuan modal hibah dari pemerintah yang terbatas.



- E. Kurangnya Pembinaan terhadap UMKM potensial, penyebabnya adalah produksi UMKM masih terbatas dan tidak kontinyu sehingga sulit untuk memasarkannya karena belum bisa memenuhi permintaan pasar.
- F. Tidak Tersedianya Data UMKM yang akurat, Penyebabnya adalah mobilitas UMKM yang ada di Kabupaten Luwu Utara sangat tinggi karena sering berpindah-pindah tempat usaha dari suatu daerah ke daerah lain yang mereka anggap lebih memberikan banyak keuntungan sehingga data yang diperoleh terputus pada setiap tahunnya.
- G. Kurangnya produk UMKM yang memiliki standar pasar, Penyebabnya adalah masih rendahnya pengetahuan UMKM tentang peningkatan kualitas produk yang memenuhi standar pasar utamanya dalam hal kemasan.
- H. Kurangnya Sarana dan Prasarana Pemasaran Bagi Produk UMKM. Penyebabnya adalah sulitnya pembebasan lahan untuk pembangunan sarana dan prasarana pemasaran termasuk pembangunan rest area pemasaran produk UMKM.
- I. Rendahnya keinginan masyarakat untuk cinta produk lokal. Penyebabnya adalah kualitas produk lokal kalah bersaing dengan produk dari luar disamping kualitasnya juga harganya lebih terjangkau oleh masyarakat.
- J. Belum adanya regulasi tentang layanan umum permodalan terhadap UMKM dan perusahaan daerah. Penyebabnya karena dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang baru terjadi perubahan banyak kewenangan dalam pembuatan regulasi tentang layanan umum.

2. Bidang Perdagangan

- A. Terbatasnya Pelaku Usaha yang berorientasi ekspor dan memiliki kemampuan mengakses informasi pasar.
- B. Belum optimalnya penataan dan Pengelolaan Pasar Tradisional.
- C. Kondisi sarana dan prasarana penunjang perdagangan belum memadai untuk mendukung kelancaran distribusi barang dan jasa.
- D. Belum adanya regulasi tentang Penataan Pedagang kaki lima dan asongan.



- E. Belum maksimalnya penataan dan pembinaan pedagang
 - F. Masih terbatasnya sarana dan prasarana perdagangan di kecamatan
 - G. Masih terbatasnya kendaraan operasional
 - H. Belum maksimalnya pemasaran produk dan komoditi unggulan.
 - I. Masih terbatasnya sarana dan prasarana resi gudang
3. Bidang Perlindungan Konsumen dan Kemetrolagian
- Masih Kurangnya Pengetahuan SDM Aparat Pengawasan Barang dan Jasa.
 - Belum Optimalnya Lembaga Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Barang Beredar.
 - Kurangnya tingkat kesadaran produsen dan konsumen tentang tertib niaga dan perlindungan konsumen.
 - Masih adanya produk yang beredar di pasaran yang belum memenuhi persyaratan yang berlaku.
 - Belum terbentuknya UPTD Kemetrolagian sehingga belum bisa dilakukan tera dan tera ulang sebagai sumber PAD.
 - Belum adanya kantor UPTD kemetrolagian sebagai tempat penyimpanan peralatan tera.
4. Bidang Perindustrian
- A. Masih rendahnya kualitas Sumber daya terampil dibidang industri
 - B. Masih rendahnya Pertumbuhan Wirausaha Baru di Bidang Perindustrian.
 - C. Kurangnya Sarana dan Prasarana Dibidang Perindustrian.
 - D. Masih Kurangnya Peralatan yang Memadai bagi Para Pelaku Usaha Industri.
 - E. Masih kurangnya produk - produk IKM yang berciri khas lokal.
 - F. Masih Rendah kualitas produk IKM.
 - G. Masih terbatasnya produk IKM berstandarisasi
 - H. Perlunya pemutakhiran Data Potensi Industri yang Akurat setiap tahun.
 - I. Belum adanya industri pariwisata (Kampung Komoditi Unggulan)
 - J. Belum maksimalnya kerjasama pelaku industri dengan pihak swasta
 - K. Perlunya Pembinaan Bagi Industri Rumah Tangga secara berkesinambungan

L. Perlunya Kawasan Pengembangan industri tahun tempe di Kecamatan Bone-Bone dan Kecamatan Sukamaju.

M. Perlunya kawasan pusat perbelanjaan Meubel

N. Pengembangan Industri Kapurung Instant sebagai produk unggulan daerah

Dari beberapa permasalahan yang dihadapi pada Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Luwu Utara maka dapat dilihat dari Isu-Isu Strategis, saat ini Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM kabupaten Luwu Utara melaksanakan 4 bidang kewenangan yaitu: Bidang Perdagangan, Bidang Perindustrian, Bidang Koperasi dan UKM, Bidang Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Barang.

Untuk memperoleh informasi tentang apa saja yang menjadi isu strategis yang akan ditangani melalui renstra Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kab.Luwu Utara di gunakan analis SWOT.

Analisis lingkungan internal Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Luwu Utara memperhatikan unsur-unsur kekuatan dan kelemahan dan analisis lingkungan eksternal memperhatikan unsur-unsur peluang dan ancaman sebagai berikut :

a. Kekuatan (*Strength*)

1. Peraturan Daerah Nomor 44 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Perda No 10 Tahun 2008 tanggal 22 Juli 2008 Tentang struktur organisasi dan tata kerja Dinas Koperindag Kabupaten Luwu Utara.
2. Adanya komitmen pimpinan yang tegas, konsisten dan didukung oleh seluruh staf.
3. Sumber Daya Manusia Relatif Mengetahui Kondisi Daerah.
4. Kerjasama dengan pihak legislatif yang baik.
5. Tersedianya Dana/Anggaran Pembangunan.

b. Kelemahan (*Weakness*)

1. Data potensi daerah beragam dan belum akurat/memadai



2. Belum maksimalnya penerapan Standar Pelayanan Minimum (SPM) perencanaan pembangunan, dan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pelaksanaan kegiatan perencanaan.
3. Jumlah dan Kemampuan staf relatif kurang.
4. Pengawasan dan Pemanfaatan teknologi informasi yang relatif kurang.
5. Kerjasama dengan pihak luar relatif masih kurang

c. Peluang (*Opportunities*)

1. Kebijakan dan kewenangan dalam pembinaan Dinas P2KUKM
2. Kebijakan Otonomi Daerah
3. Potensi Sumber Daya Alam yang cukup besar
4. Jumlah Koperasi dan UKM cukup Banyak
5. Adanya dukungan Masyarakat luas terhadap program-program Dinas P2KUKM.

d. Tantangan (*Threats*)

1. Kondisi Sosial ekonomi masyarakat masih rendah dan tidak stabil
2. Partisipasi aktif masyarakat dalam pengembangan koperasi masih rendah.
3. Sarana Pemasaran terhadap Produk UMKM masih Kurang.
4. Keterbatasan Modal Berusaha terhadap Pelaku Ekonomi masih kecil.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD dimulai dengan mengacu kepada Issu Pembangunan yang tertuang dalam Visi Misi Kabupaten Luwu Utara dan Visi Misi Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM yakni :

1. Meningkatkan Industri kreatif yang berdaya saing tinggi
2. Meningkatkan kualitas Koperasi sebagai penopang perekonomian masyarakat.
3. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia bagi pengelola Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
4. Meningkatkan sarana Infrastruktur pengembangan kawasan industri
5. Fasilitasi pengembangan modal usaha bagi UMKM



Rencana Kerja Perubahan(RENJA-P) Tahun 2017

6. Pengembangan Industri Kecil Menengah dalam rangka peningkatan ekonomi kerakyatan
7. Meningkatkan Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
8. Meningkatkan nilai transaksi perdagangan dan net ekspor antar daerah.
9. Meningkatkan kontribusi sektor perdagangan dan sektor industri terhadap PDRB.

Jumlah Program/kegiatan yang direview sesuai dengan target renstra dan RPJMD adalah sebanyak 18 program dengan 45 kegiatan dengan 5 bidang yaitu : Bidang Sekretariat, Bidang Koperasi dan UKM, Bidang Perindustrian, Bidang Perdagangan, dan Bidang Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Barang . Review ini bertujuan memudahkan dalam melakukan evaluasi capaian target setiap tahunnya sehingga program dan kegiatan yang dilakukan dapat terukur dan dapat menjadi penilaian terhadap kinerja satuan kerja perangkat daerah dalam hal ini Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM. Langkah-langkah yang dilakukan adalah : (1.) Identifikasi sasaran pembangunan, prioritas program dan target kinerja program, (2.) Evaluasi pencapaian prioritas program berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renstra Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM tahun-tahun sebelumnya, (3.) Membuat rumusan kemungkinan permasalahan pembangunan daerah dikaitkan dengan capaian kinerja program Renstra Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM dan pencapaian visi dan misi Bupati, (4.) Mengidentifikasi kebijakan yang diperlukan.

Review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2017 Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Luwu Utara dapat dilihat jelas pada Tabel. 3 berikut :



TABEL 3
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD-P TAHUN 2017
KABUPATEN LUWU UTARA

Kode Rekening							Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
							Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3 06 3 06 01 06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN																
3 06 3 06 01 06 01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas Perdinkop	Jumlah Dokumen yang disinkronkan	2	dok	8,092,000	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas Perdinkop	Jumlah Dokumen yang disinkronkan	2	dok	13,630,000					
3 06 3 06 01 06 06	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	Dinas Perdinkop	Jumlah dokumen Perencanaan yang disinkronkan	10	dok	60,962,800	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	Dinas Perdinkop	Jumlah dokumen Perencanaan yang disinkronkan	10	dok	71,590,960					
3 06 3 06 01 09	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN																
3 06 3 06 01 09 04	Kunjungan Kerja Bersama Bupati/Wakil Bupati/DPRD/Muspida/Pejabat Pemerintah tingkat atas/unit kerja terkait	Kab. Luwu Utara	Jumlah pegawai yang melaksanakan kunjungan kerja	46	pegawai	100,663,500	Kunjungan Kerja Bersama Bupati/Wakil Bupati/DPRD/Muspida/Pejabat Pemerintah tingkat atas/unit kerja terkait	Kab. Luwu Utara	Jumlah pegawai yang melaksanakan kunjungan kerja	46	pegawai	117,663,500					
3 06 3 06 01 05	PROGRAM PENINGKATAN SUMBER DAYA APARATUR																
3 06 3 06 01 05 03	Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab.Lutra, Prov.Sul-Sel dan Luar Prov.Sul Sel	Jumlah Bimtek yang diikuti	18	pegawai	61,610,200	Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab.Lutra, Prov.Sul-Sel dan Luar Prov.Sul Sel	Jumlah Bimtek yang diikuti	18	pegawai	103,640,200					

1							2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
							PENCIPTAAN IKLIM USAHA KECIL MENENGAH YANG KONDUSIF											
2	11	3	06	01	15													
							Penyusunan kebijakan tentang Usaha Kecil Menengah	Kab. Luwu Utara	Jumlah Perda yang terbit	1	Ranperda/ Perda Perusda	77,150,000	Penyusunan kebijakan tentang Usaha Kecil Menengah	Kab. Luwu Utara	Jumlah Perda yang terbit	1	Ranperda/ Perda Perusda	78,275,000
2	11	3	06	01	15	01												
							PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEUNGGULAN KOMPETITIF UMKM											
2	11	3	06	01	16													
							Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan	Se Kab. Luwu Utara	Jumlah SDM UMKM yang dilatih	30	UMKM	44,290,000	Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan	Se Kab. Luwu Utara	Jumlah SDM UMKM yang dilatih	30	UMKM	43,690,000
2	11	3	06	01	16	06												
							PENGEMBANGAN SISTEM PENDUKUNG USAHA BAGI UMKM											
2	11	3	06	01	17													
							Pemantauan, Pengelolaan Penggunaan Dana Pemerintah Bagi UMKM	Kab.Luwu Utara	Jumlah Dana Bergulir yang dikembalikan oleh UMKM	102	UMKM	44,780,500	Pemantauan, Pengelolaan Penggunaan Dana Pemerintah Bagi UMKM	Kab.Luwu Utara	Jumlah Dana Bergulir yang dikembalikan oleh UMKM	102	UMKM	62,405,500
2	11	3	06	01	17	05												
									Jumlah UMKM yang dibina	120	UMKM				Jumlah UMKM yang dibina	120	UMKM	
							Penyelenggaraan Promosi Produk UMKM	Kab.Lutra, Prov.Sul-Sel dan Luar Prov.Sul Sel	Jumlah Produk UMKM yang di Promosikan	25	produk	71,250,000	Penyelenggaraan Promosi Produk UMKM	Kab.Lutra, Prov.Sul-Sel dan Luar Prov.Sul Sel	Jumlah Produk UMKM yang di Promosikan	25	produk	105,260,000
2	11	3	06	01	17	09												

[illegible]

1							2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
2	07	1	15	01	16		PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH												
2	07	1	15	01	16	02	Fasilitasi Bagi Industri Kecil dan Menengah terhadap pemanfaatan sumber daya	Sabbang, Mappedeceng, Bone-Bone, Tanalili, Malbar, Malangke.	Rasio IKM yang memenuhi kualifikasi untuk dibantu (100 IKM yang memenuhi kualifikasi)	5	klp	205,535,000	Fasilitasi Bagi Industri Kecil dan Menengah terhadap pemanfaatan sumber daya	Sabbang, Mappedeceng, Bone-Bone, Tanalili, Malbar, Malangke.	Rasio IKM yang memenuhi kualifikasi untuk dibantu (100 IKM yang memenuhi kualifikasi)	5	klp	180,123,750	
2	07	1	15	01	16	04	Pemberian Kemudahan Izin Usaha Industri Kecil dan Menengah	Kab.Luwu Utara	Jumlah Industri yang telah didata	60	IKM	58,000,000	Pemberian Kemudahan Izin Usaha Industri Kecil dan Menengah	Kab.Luwu Utara	Jumlah Industri yang telah didata	60	IKM	58,000,000	
2	07	1	15	01	16	06	Fasilitasi kerjasama kemitraan Industri mikro, kecil menengah dengan swasta	Kab.Luwu Utara	Jumlah IKM yang bermitra dengan swasta	3	IKM	43,500,000	Fasilitasi kerjasama kemitraan Industri mikro, kecil menengah dengan swasta	Kab.Luwu Utara	Jumlah IKM yang bermitra dengan swasta	3	IKM	43,500,000	
3	06	3	06	01	15		PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN												
3	06	3	06	01		01	Koordinasi peningkatan hubungan kerja dengan lembaga perlindungan konsumen	Kab.Luwu Utara	Jumlah Kasus yang diselesaikan	5	Kasus	39,260,000	Koordinasi peningkatan hubungan kerja dengan lembaga perlindungan konsumen	Kab.Luwu Utara	Jumlah Kasus yang diselesaikan	5	Kasus	91,415,000	
3	06	3	06	01	15	03	Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa	9 Kecamatan	Persentase penurunan barang kadaluarsa	15	%	95,009,300	Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa	9 Kecamatan	Persentase penurunan barang kadaluarsa	15	%	100,009,300	
									Jumlah barang kadaluarsa yang diawasi	8	Kec				Jumlah barang kadaluarsa yang diawasi	8	Kec		
3	06	3	06	01	15	04	Operasionalisasi dan Pengembangan UPT Kemetrolagian Daerah	9 Kec.	Jumlah Peralatan UTTP Kemetrolagian yang ditera	2000	unit	142,650,000	Operasionalisasi dan Pengembangan UPT Kemetrolagian Daerah	9 Kec.	Jumlah Peralatan UTTP Kemetrolagian yang ditera	2000	unit	165,218,700	

1							2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
3	06	3	06	01	18		PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI												
3	06	3	06	01	18														
3	06	3	06	01	18	03	Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/Produk	Kec. Bone-Bone, Sukamaju, Sabbang	Jumlah Pasar Tradisional yang dibangun	2	unit	3,307,950,200	Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/Produk	Kec. Bone-Bone dan Tanalili	Jumlah Pasar Tradisional yang dibangun	2	unit	3,274,019,550	
									Jumlah Penimunan pasar	1	Paket				Jumlah Penimunan pasar	1	Paket		
3	06	3	06	01	18	05	Pengembangan Pasar Lelang Daerah	Kab. Luwu Utara	Jumlah Pengusaha dan Kelompok Tani yang mengikuti Pasar lelang	10	poktan	39,250,000	Pengembangan Pasar Lelang Daerah	Kab. Luwu Utara	Jumlah Pengusaha dan Kelompok Tani yang mengikuti Pasar lelang	10	poktan	52,289,000	
2	06	1	15	01	18	06	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	9 Kecamatan	Jumlah data pasar	41	pasar	170,655,500	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	9 Kecamatan	Jumlah data pasar	41	pasar	170,655,500	
								Jumlah kebutuhan pokok yang didata	4 pasar	23	jenis			Jumlah kebutuhan pokok yang didata	4 pasar	23	jenis		
								Jumlah pedagang yang didata		2000	pdg			Jumlah pedagang yang didata		2000	pdg		
3	06	3	06	01	18	07	Sosialisasi peningkatan penggunaan produk dalam negeri	Jumlah Paket Pasar Murah	Luwu Utara	2000	paket	73,696,000	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (Pasar Murah)	Jumlah Paket Pasar Murah	Luwu Utara	2000	paket	72,936,000	
							JUMLAH					4,994,840,000						5,129,779,960	

KEPALA DINAS,

Drs. H.MUSLIM MUCHTAR,M.Si

Pangkat : Pembina TK.I

NIP : 19671212198908 1 002

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program kegiatan yang dijabarkan lewat penganggaran Kegiatan Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Luwu Utara merupakan aspiratif dan keinginan masyarakat yang dituangkan dalam musrenbang ditambah dengan top down dari dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM sendiri yang diperoleh dari potensi daerah yang digabungkan dan kemudian memverifikasi semua yang diusulkan dengan jalan melakukan perangkingan dengan mempertimbangkan skala prioritas karena keterbatasan anggaran. Dari hasil perangkingan itulah yang selanjutnya diusulkan untuk masuk pada penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) berdasarkan Tupoksi dan Visi Misi Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM. Hasil evaluasi Musrenbang yang telah dilakukan di 12 Kecamatan berdasarkan usulan pemangku kepentingan maka ada 5 program dan 6 kegiatan pendukungnya yaitu :

1. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif
Kegiatan : a. Fasilitasi pengembangan usaha kecil menengah
2. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
Kegiatan : a. Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya
3. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
Kegiatan : Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi
4. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
Kegiatan : a. Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk
b. Pengembangan fasilitasi dan sarana distribusi perdagangan
5. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
Kegiatan : a. Pembinaan kemampuan teknologi industri

Daftar usulan pemangku kepentingan berdasarkan hasil hasil Musrenbang Kabupaten dapat terlihat pada tabel 4 berikut :



Tabel 4
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN
DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2017
KABUPATEN LUWU UTARA

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN VOLUME	CATATAN
1	2	3	4	5	6
1	Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif				
1	Fasilitasi pengembangan usaha kecil	Desa Harapan Kec. Mappedeceng	Jumlah UMKM yang mendapatkan	5 Klp	
	menengah	Desa Sidoarjo	Bantuan Modal Usaha dari	3 Koptan	
			Pemerintah (KUR)		
		Desa Pombakka Kec. Malbar		1 Klp	
		Desa Terpedo Jaya		2 Klp	
		Desa Salama Kec. Sabbang		1 Klp	
2	Pengembangan Industri Kecil dan Menengah				
1	Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah	Mesin pengupas Kopi (Desa Komba Kec. Limbong)	Jumlah IKM yang mendapatkan	1 klp	
	terhadap pemanfaatan sumber daya	Mesin Penggilingan Kopi (Desa Komba Kec. Limbong)	fasilitasi dari pemerintah	1 klp	
		Mesin Pengering Kopi (Desa Komba Kec. Limbong)		1 Klp	
		Mesin pengupas Kopi (Desa Kanandede Kec. Limbong)		4 Klp	Prioritas
		Mesin Penggilingan Kopi (Desa Kanandede Kec. Limbong)		4 Klp	
		Mesin Pengering Kopi (Desa Kanandede Kec. Limbong)		4 Klp	
		Peralatan Industri Tahu Tempe (Ds.Sumber Harun Kec. Mpd)		4 Klp	
		Peralatan Industri Tahu Tempe (Ds.Hasanah Kec. Mpd)		2 Klp	Prioritas

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN VOLUME	CATATAN
1	2	3	4	5	6
		Peralatan Industri Roti Bolu (Ds.Sumber harun Kec.Mpd)		3 Klp	
		Peralatan Industri Gula Merah (Ds.Sumber Harun Kec. Mpd)		15 klp	
		Peralatan Industri Gula Merah (Ds.Hasanah Kec. Mpd)		4 Klp	
		Peralatan Industri Keripik pisang (Ds.Sumber Harun Kec.MPd)		4 Klp	Prioritas
		Peralatan Pengolahan sagu (Desa Sapta Marga Kec. Skmj)		2 Klp	
		Peralatan Pengolahan sagu (Desa Cenning Marga Kec.malbar)		2 Klp	
		Peralatan Gilingin Tebu (Ds. Padang Raya Kec.Seko)		1 Klp	Prioritas
		Peralatan mesin pengupas Kopi (Ds.Tirolali Kec.Seko)		1 Klp	
		Peralatan Gilingin Tebu (Ds. Embonatana Kec.Seko)		1 Klp	
		Peralatan Gilingin Tebu (Ds. Hono Kec.Seko)		1 Klp	Prioritas
		Peralatan Gilingin Tebu (Ds. Marante Kec.Seko)		1 Klp	
		Peralatan mesin pengupas Kopi (Ds.Malimongan Kec.Seko)		3 Klp	
		Peralatan mesin pengupas Kopi (Ds.Tanamakaleang Kec.Seko)		3 Klp	
		Peralatan Gilingin Tebu (Ds. Tirolali Kec.Seko)		1 Klp	
		Peralatan Meubel Kayu (Kel.Kappuna Kec. Masamba)		1 Klp	
		Pengadaan Penyulingan Minyak Nilam (Desa Arusu)		2 Unit	
		Pengadaan Penyulingan Minyak Nilam (Desa Polejiwa)		2 Unit	
		Peralatan Pertukangan (Desa Waetuo)		1 Klp	
		Pengadaan Penyulingan Minyak Nilam (Desa Pongo)		1 Klp	
		Peralatan bengkel Las Desa Onondoa Kec. Rampi		1 Klp	Prioritas
		Peralatan pembuatan kue desa Laba Masamba		1 Klp	Prioritas
		Peralatan keripik pisang Desa Lambuara Kec. Tanalili		1 Klp	Prioritas
		Peralatan meubel kayu Ling. Bamba Kec. Bone-Bone		1 Klp	Prioritas
		Peralatan industri kue basah desa buangin kec. Sabbang		1 Klp	Prioritas

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN VOLUME	CATATAN
1	2	3	4	5	6
3	Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi				
1	Pembinaan,Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi	Pembentukan Koperasi (Desa Benteng Kec. Mappdcg) Pembentukan Koperasi (Desa Sumberdadi Kec. Tanalili)		1 Klp 1 Klp	Prioritas Prioritas
4	Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri				
1	Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk	Pasar Tradisional Ds. Bungapati Kec. Tanalili	Jumlah Pasar Tradisional yang terbangun	1 unit	
		Lanjutan Pembangunan Pasar Tradisional Bone-Bone Desa Patoloan		1 Unit	
		Rehab Pasar Sabbang		1 paket	
		Penimbunan pasar Bone-Bone		1 paket	
5	Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri				
1	Pembinaan kemampuan teknologi Industri	Pelatihan Home Industri Ds. Munte Kec. Tanalili	Jumlah IKM yang dilatih	1 Klp	
		Pelatihan Home Industri Ds. Tulak Tallu Kec. Sabbang	industri Pengolahan yang berbasis pertanian, perikanan dan kelautan	1 Klp	

BAB. III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Ada 9 program menuju Perubahan untuk Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian yaitu :

1. Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga Negara, melalui politik luar negeri bebas aktif, keamanan nasional yang terpercaya dan pembangunan pertahanan Negara Tri Matra terpadu yang dilandasi kepentingan nasional dan memperkuat jati diri sebagai Negara maritime.
2. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tatakelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, dengan memberikan prioritas pada upaya memulihkan kepercayaan public pada institusi-institusi demokrasi dengan melanjutkan konsolidasi demokrasi melalui reformasi sistem kepartaian, pemilu, dan lembaga perwakilan.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara kesatuan.
4. Menolak Negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program “ Indonesia Pintar “, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan program “ Indonesia Kerja “ dan “ Indonesia Sejahtera “ dengan mendorong land reform dan program kepemilikan tanah seluas 9 hektar, program rumah kampung deret atau rumah susun murah yang disubsidi serta jaminan sosial untuk rakyat di tahun 2019.
6. Meningkatkan produktifitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.



Rencana Kerja Perubahan (RENJA-P) Tahun 2017

7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa melalui kebijakan penataan kembali kurikulum pendidikan nasional dengan mengedepankan aspek pendidikan kewarganegaraan, yang menempatkan secara proporsional aspek pendidikan, seperti pengajaran sejarah pembentukan bangsa, nilai-nilai patriotisme dan cinta tanah air, semangat bela Negara dan budi pekerti di dalam kurikulum pendidikan Indonesia.
9. Memperteguh kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia melalui kebijakan memperkuat pendidikan kebhinnekaan dan menciptakan ruang-ruang dialog antarwarga.

3.1.1 Telaahan Visi, Misi dan Platform Perubahan

Amanat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 :

1. Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah
2. Memajukan kesejahteraan umum
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa
4. Ikut memelihara ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, keadilan sosial dan perdamaian abadi.

Visi Pembangunan Indonesia adalah “**Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong**”

Visi tersebut mengandung makna bahwa :

Berdaulat adalah Setiap Bangsa berhak menentukan nasib sendiri dan menentukan apa yang terbaik bagi bangsa

Mandiri adalah Bangsa yang mampu mewujudkan kehidupan sejajar dan sederajat dan sederajat dengan bangsa lain yang telah maju dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri.

Gotong Rotong adalah Intisari dari Ideologi Pancasila 1 Juni 1945, bahwa tanggungjawab membangun bangsa adalah dengan cara musyawarah dalam memutuskan dan gotong royong dalam kerja.



Rencana Kerja Perubahan(RENJA-P) Tahun 2017

Upaya untuk mewujudkan Visi tersebut akan ditempuh melalui Misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya maritime, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai Negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeimbangan dan demokratis berlandaskan Negara Hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai Negara maritim
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing
6. Mewujudkan Indonesia menjadi Negara Maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan

3.2. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Luwu Utara yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang dirumuskan berdasarkan visi dan misi pembangunan Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016-2021.

3.2.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Mewujudkan Misi Kesatu

Tujuan Misi 1

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam basis kehidupan yang religious
2. Meningkatkan partisipasi lembaga adat dalam pelaksanaan pembangunan

Tujuan 1

Sasaran :

3. Terimplementasi kannya prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi, serta patuh pada supremasi hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan



Rencana Kerja Perubahan (RENJA-P) Tahun 2017

4. Meningkatnya penghayatan, pengamalan dan peran agama dalam penyelenggaraan pembangunan

Tujuan 2

Sasaran :

1. Meningkatnya partisipasi dan peran lembaga/komunitas adat dalam pembangunan

Tujuan Misi 2

Tujuan 1

Meningkatkan pelayanan kesehatan dan kondisi hidup sehat masyarakat.

Sasaran :

Meningkatnya akses dan kualitas kesehatan serta penerapan pola hidup sehat dalam masyarakat

Tujuan 2

Meningkatkan kualitas pemukiman serta pemenuhan rumah layak huni bagi masyarakat khususnya bagi masyarakat kurang mampu

Sasaran :

Terpenuhinya kebutuhan rumah layak huni dan pemukiman bersanitasi baik

Tujuan Misi 3

Tujuan 1

Meningkatkan derajat pendidikan dan kemampuan literasi masyarakat

Sasaran :

Meningkatnya akses dan kualitas layanan pendidikan dan literasi masyarakat

Tujuan 2

Mendorong prestasi kepemudaan dan peran perempuan dalam pembangunan

Sasaran :

1. Meningkatnya prestasi kepemudaan dan keolahragaan



Rencana Kerja Perubahan (RENJA-P) Tahun 2017

2. Meningkatnya pengarusutamaan gender dan perlindungan anak dalam pembangunan

Tujuan 3

Meningkatkan apresiasi, revitalisasi dan pelestarian keragaman dan kekayaan budaya

Sasaran :

Meningkatnya ruang apresiasi keragaman budaya dan kekayaan budaya

Tujuan Misi 4

Tujuan 1

Meningkatkan produksi dan produktivitas sektor-sektor perekonomian serta pengembangan potensi pusat-pusat pertumbuhan wilayah

Sasaran :

1. Meningkatnya produksi dan produktifitas pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan
2. Meningkatnya produksi dan produktivitas koperasi dan UMKM
3. Berkembangnya kawasan ekonomi dan industry kreatif cepat tumbuh
4. Meningkatnya nilai perdagangan barang dan jasa

Tujuan 2

Mengembangkan iklim investasi yang baik bagi pemodal asing dan dalam negeri untuk tumbuhnya industri agro dan non agro serta perdagangan dan jasa.

Sasaran :

Meningkatnya daya saing investasi dari PMDN dan PMA

Tujuan 3

Mengembangkan potensi pariwisata menjadi destinasi dan daya tarik wisata yang refresentatif



Rencana Kerja Perubahan (RENJA-P) Tahun 2017

Sasaran :

Meningkatnya daya tarik dan daya saing pariwisata

Tujuan Misi 5

Tujuan

Memelihara keseimbangan antara pemanfaatan dan perlindungan lingkungan untuk keberlanjutan daya dukung lingkungan

Sasaran :

Terpeliharanya daya dukung, daya tampung dan keseimbangan lingkungan dalam penyelenggaraan pembangunan

Tujuan Misi 6

Tujuan 1

Mengurangi ketimpangan pendapatan antar lapisan masyarakat pada tatanan perkotaan, pedesaan, pegunungan, dataran rendah dan pesisir pantai serta kesenjangan kemajuan antar kecamatan

Sasaran :

1. Tertanggulangnya kemiskinan pada masyarakat lapisan bawah di area pesisir/ pantai, dataran rendah, pegunungan, perdesaan dan perkotaan
2. Meningkatnya daya saing tenaga kerja dan produktivitas masyarakat

Tujuan 2

Menyediakan dan meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana wilayah dari pinggiran daerah dengan memper-kuat desa-desa hingga ke per-kota.

Sasaran :

1. Terpenuhinya kebutuhan jalan dan jembatan dalam interkoneksi wilayah antar desa dan dari desa ke kota
2. Terpenuhinya kebutuhan sarana/prasarana perhubungan dalam mendukung pergerakan barang dan jasa
3. Terpenuhinya kebutuhan sarana/prasarana energi dalam mendukung kebutuhan rumah tangga dan perkembangan industri



Rencana Kerja Perubahan (RENJA-P) Tahun 2017

4. Terpenuhinya kebutuhan sarana/prasarana sumberdaya air dalam mendukung kebutuhan rumah tangga dan industri
5. Terpenuhinya kebutuhan sarana/prasarana komunikasi dalam mendukung kebutuhan masyarakat

Tujuan Misi 7

Tujuan

Memelihara rasa aman dan melindungi masyarakat dari kerentanan atas bencana dan Perlindungan Konsumen

Sasaran :

1. Menurunnya gangguan ketertiban dan keamanan dalam masyarakat
2. Menurunnya jumlah pemakai narkoba
3. Meningkatnya perlindungan kepada masyarakat dari kerentanan atas bencana dan perlindungan konsumen

Dalam upaya pencapaian visi tersebut, berdasarkan identifikasi permasalahan dalam pelayanan Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Luwu Utara terdapat beberapa Faktor-faktor penghambat dan pendorong dalam pelaksanaan Tupoksi Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, terdapat beberapa **faktor penghambat** dan **pendorong** pencapaian kinerja yang mempengaruhi pencapaian Visi dan Misi Bupati/Wakil Bupati terpilih yaitu:

1. Faktor-Faktor Penghambat:
 - a. Internal
 1. Belum optimalnya sumber daya aparat yang kompeten dalam meningkatkan kualitas kinerja Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
 2. Belum memadainya sarana dan prasarana pendukung dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.
 - b. Eksternal



Rencana Kerja Perubahan(RENJA-P) Tahun 2017

1. Belum adanya Standar Pelayanan Minimum (SPM) perencanaan pembangunan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pelaksanaan perencanaan.
2. Lemahnya koordinasi antar kabupaten/kota, Provinsi dan Pusat
3. Terbatasnya alokasi anggaran.
4. Rendahnya kualitas SDM pengelola Koperasi
5. Rendahnya kualitas SDM pengelola UKM dan IKM
2. Faktor-Faktor Pendorong:
 - a. Internal
 1. Tingginya motivasi kerja aparatur.
 2. Adanya komitmen pimpinan dan konsistensi yang didukung oleh seluruh staf
 3. Adanya iklim kerja yang kondusif
 4. Tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
 5. Adanya peraturan pemerintah yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
 - b. Eksternal
 1. Adanya dukungan peran sektor informal
 2. Tingginya koordinasi antar kelompok usaha, Koperasi, dan Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dalam mendukung ketersediaan data sebagai bahan perencanaan dan pelaporan
 3. Adanya kesempatan bagi UKM, IKM dan staf mengikuti diklat teknis.

A. Telahaan Renstra Kementrian Koperasi dan UKM RI, Kementrian Perindustrian RI, Kementrian Perdagangan RI, Renstra Dinas Koperasi dan UKM Proppinsi Sulawesi Selatan serta Dinas Perindag Propinsi Sulawesi Selatan

1. Renstra Kementrian Koperasi dan UKM Republik Indonesia Tahun 2015 - 2019

Mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 09/M/2005 Tanggal 31 Januari 2015 bahwa kedudukan Kementrian Koperasi dan UKM



Rencana Kerja Perubahan (RENJA-P) Tahun 2017

adalah unsur pelaksana pemerintah dengan tugas membantu Presiden untuk mengkoordinasikan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan pemberdayaan Koperasi dan UKM di Indonesia. Sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsinya Kementerian Koperasi dan UKM telah menetapkan visi, yaitu:

“Menjadi Lembaga Pemerintah yang kredibel dan efektif untuk merdinamisasi pemberdayaan koperasi dan UMKM dalam rangka meningkatkan produktivitas, daya saing dan kemandirian “

Misi Kementerian Koperasi dan UKM adalah : Memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan nasional melalui perumusan kebijakan nasional; pengkoordinasian perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kebijakan pemberdayaan di Bidang Koperasi dan UMKM; serta peningkatan sinergi peran aktif masyarakat dan dunia usaha dalam rangka meningkatkan produktivitas, daya saing dan kemandirian Koperasi dan UMKM secara sistematis , berkelanjutan dan terintegrasi secara nasional. Untuk mencapai visi tersebut diatas terdapat Beberapa faktor penghambat dan pendotong dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dinas koperasi, perindustrian dan perdagangan ditinjau dari sasaran jangka menengah renstra kementerian Koperasi dan UKM

Faktor-Faktor Penghambat:

1. Kurangnya Koordinasi dalam perencanaan
2. Rendahnya kualitas SDM pengelola UKM dan Koperasi
3. Terbatasnya permodalan koperasi

Faktor-Faktor Pendorong:

1. Adanya motivasi kerja aparatur.
2. Adanya konsisten dan komitmen pimpinan.
3. Adanya Peraturan sebagai dasar dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
4. Adanya kesempatan bagi Pengelola UKM dan Koperasi mengikuti diklat teknis.
5. Adanya koordinasi dan kerjasama antara daerah dan provinsi.



2. Telaahan Renstra Kementerian Perindustrian Republik Indonesia Tahun 2015-2019

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian telah meletakkan industri sebagai salah satu pilar ekonomi dan memberikan peran yang cukup besar kepada Pemerintah untuk mendorong kemajuan industri nasional secara terencana.

Visi Pembangunan Industri Nasional adalah “ *Indonesia Menjadi Negara Industri Tangguh* “.

Industri Tangguh bercirikan :

1. Struktur industri nasional yang kuat, dalam, sehat dan berkeadilan;
2. Industri yang berdaya saing tinggi ditingkat global;
3. Industri yang berbasis inovasi dan teknologi

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, pembangunan industri nasional mengemban misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan peran industri nasional sebagai pilar dan penggerak perekonomian nasional;
2. Memperkuat dan memperdalam struktur industri nasional;
3. Meningkatkan industri yang mandiri, berdaya saing, dan maju serta industri hijau;
4. Menjamin kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat;
5. Membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja;
6. Meningkatkan persebaran pembangunan industri keseluruhan wilayah Indonesia guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional;
7. Meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan

Tahapan I (2015 – 2019) arah rencana pembangunan industri adalah untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam pada industri hulu berbasis agro,



Rencana Kerja Perubahan (RENJA-P) Tahun 2017

mineral dan migas, yang diikuti dengan pembangunan industry pendukung dan andalan serta selektif melalui penyiapan SDM yang ahli dan kompeten dibidang industry, serta meningkatkan penguasaan teknologi.

Beberapa factor penghambat dan pendorong dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah ditinjau dari sasaran jangka menengah renstra kementerian Perindustrian adalah sebagai berikut :

Faktor-Faktor Penghambat:

1. Lemahnya koordinasi antar kabupaten/kota Provinsi dan Pusat
2. Rendahnya kualitas SDM pengelola Industri Kecil dan Menengah (IKM)

Faktor-Faktor Pendorong:

1. Adanya Peraturan sebagai dasar dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
2. Adanya kesempatan bagi Pengelolah Industri Kecil dan Menengah (IKM) dan staf mengikuti diklat teknis.

3. Telaahan Renstra Kementerian Perdagangan Republik Indonesia Tahun 2015-2019.

RPJPN 2005- 2025 menetapkan bahwa RPJMN 2015- 2019, yang merupakan RPJMN Tahap III, bertujuan untuk lebih memantapkan penataan Indonesia di segala bidang dengan menekankan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia termasuk pengembangan ilmu dan teknologi serta penguatan daya saing perekonomian. Kementerian Perdagangan sebagai salah satu pelaku pembangunan perekonomian akan ikut berperan penting dalam mewujudkan daya saing ekonomi nasional. Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan perkembangan, masalah, dan berbagai kecenderungan pembangunan perekonomian ke depan, maka VISI Kementerian Perdagangan sejalan dengan misi Pemerintah adalah:

“ Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong ”



Rencana Kerja Perubahan (RENJA-P) Tahun 2017

Untuk menjembatani Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden periode 2015 – 2019 dalam melaksanakan agenda pembangunan nasional, Kementerian Perdagangan periode 2015 – 2019 memiliki 3 (tiga) misi dalam membangun sektor perdagangan yaitu :

1. Meningkatkan pertumbuhan kinerja perdagangan luar negeri yang berkelanjutan;
2. Meningkatkan perdagangan dalam negeri yang bertumbuh dan berkualitas; dan
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di sektor perdagangan.

Beberapa faktor penghambat dan pendotong dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah ditinjau dari sasaran jangka menengah renstra kementerian Perdagangan

Faktor-Faktor Penghambat:

1. Lemahnya koordinasi antar kabupaten/kota Provinsi dan Pusat
2. Rendahnya kualitas SDM pengelola Dagang Kecil dan Menengah

Faktor-Faktor Pendorong:

1. Adanya Peraturan sebagai dasar dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
2. Adanya kesempatan bagi Dagang Kecil dan Menengah dan staf mengikuti diklat teknis.

4. Telaahan Renstra Dinas Koperasi dan UKM Propinsi Sulawesi Selatan

Pembangunan Sulawesi Selatan merupakan gambaran kesuksesan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 tahun kedepan yang disusun dengan memperhatikan RPJPD 2008-2028 Sulawesi Selatan, substansi RPJM Nasional, dinamika lingkungan strategis, aspirasi masyarakat dan pemerintah Sulawesi Selatan, serta visi misi Gubernur/Wakil Gubernur. Visi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (KUMKM) Provinsi Sulawesi Selatan adalah visi bersama seluruh unit didalam organisasi yaitu :



Rencana Kerja Perubahan (RENJA-P) Tahun 2017

“Menjadikan Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (KUMKM) sebagai Pilar Utama Perekonomian Sulawesi Selatan pada Tahun 2018”.

Pilar : Dalam arti kinerja usaha yang sesuai prinsip-prinsip Koperasi dan kaidah bisnisnya.

Utama : Dalam arti Partisipasi anggotanya

Beberapa faktor penghambat dan pendorong ditinjau dari sasaran jangka menengah renstra Dinas Koperasi dan UKM Propinsi Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut :

Faktor-Faktor Penghambat:

1. Alokasi anggaran pada upaya pengembangan sektoral masih minim
2. Belum terdapatnya sarana produksi yang sesuai standar
3. Penjelasan terkait dengan tataruang pengembangan wilayah belum membahas khusus tentang penempatan lokasi usaha bagi KUMKM
4. Masih banyaknya reaktor biogas yang tidak berfungsi dengan baik
5. Kurangnya pengetahuan bagi pengelola KUMKM mengenai pemanfaatan limbah biogas untuk menjadi pupuk organik
6. Belum terdapatnya regulasi yang mengatur hubungan integrative antar komoditi

Faktor-Faktor Pendorong:

1. Adanya dukungan dari daerah baik dalam bentuk penyediaan lahan dan dalam dukungan anggaran
2. Dukungan anggaran dari kementrian melalui dekonsentrasi dan tugas pembantuan
3. Komitmen pimpinan kementrian dan jajarannya
4. Adanya keselarasan antara pengembangan pertanian/sawah/palawija dengan pengembangan ternak sapi potong dan unggas
5. Adanya keselarasan antara pengembangan perkebunan dengan pengembangan ternak kecil



Rencana Kerja Perubahan (RENJA-P) Tahun 2017

6. Reaktor biogas, bukan hanya dapat menghasilkan biogas, namun output stury member potensi yang sangat besar untuk produksi pupuk organik padat dan cair

5. Telaahan Rensra Dinas Perindag Provinsi Sulawesi Selatan

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan, maka visi Dinas Perindag Tahun 2013-2018 yang hendak dicapai dalam tahapan pertama pembangunan jangka panjang daerah Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut :

” Sulawesi Selatan Sebagai Pilar Utama Pembangunan Nasional dan Simpul Jejaring Akselerasi Kesejahteraan ”

Pilar Utama Pembangunan Nasional : Gambaran tentang kondisi Sulawesi Selatan pada Tahun 2018 yang menjadi acuan dan berkontribusi nyata terhadap solusi persoalan mendasar bangsa Indonesia.

Simpul Jejaring : Gambaran tentang kondisi Sulawesi Selatan pada tahun 2018 yang menjadi simpul distribusi barang dan jasa.

Akselerasi Kesejahteraan : Gambaran tentang kondisi Sulawesi Selatan pada tahun 2018 yang sudah mencapai fase akhir tinggal landas dan memasuki awal kematangan ekonomi.

Beberapa faktor penghambat dan pendorong ditinjau dari sasaran jangka menengah renstra Dinas Perindag Propinsi Sulawesi Selatan

Faktor-Faktor Penghambat:

1. Belum berfungsinya secara optimal system informasi yang ada sehingga tingkat layanan pada dunia usaha dalam aspek informasi teknologi industry, peluang dan tantangan pasar masih relatif rendah



Rencana Kerja Perubahan(RENJA-P) Tahun 2017

2. Keresasian dan sinergitas program antara perangkat pelaksanaan masih perlu ditingkatkan dan terfokus pada komoditas unggulan
3. Masih dibutuhkan tambahan tenaga teknis dan operasional
4. Sistem pembelajaran organisasi belum berjalan secara optimal serta belum mampu mengembangkan budaya belajar dengan bekerja

Faktor-Faktor Pendorong:

2. Meningkatkan koordinasi perencanaan antara pusat, propinsi dan Kabupaten kota.
3. Mendorong dan mengembangkan infrastruktur serta penciptaan iklim usaha yang kondusif.
4. Meningkatkan kemampuan SDM para pelaku usaha
5. Meningkatkan kemampuan inovasi teknologi
6. Meningkatkan kapasitas sarana distribusi dan kemampuan logistic
7. Meningkatkan kualitas dan kuantitas aparatur yang mempunyai kompetensi.

B. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

1. Telaahan Terhadap RTRW Kabupaten Luwu Utara

a. Tujuan

Tujuan Penataan Ruang pada RTRW kabupaten Luwu Utara adalah untuk mewujudkan Kabupaten Luwu Utara yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berbasis agro dan kelautan dengan memperhatikan aspek lingkungan dan aspek bencana demi terciptanya kesejahteraan masyarakat Luwu Utara.

b. Kebijakan dan Strategi

Kebijakan dan strategis penataan ruang wilayah mencakup pengembangan struktur ruang, pola ruang dan kawasan strategis kabupaten, meliputi :

- 1). Kebijakan Penetapan pusat-pusat kegiatan yang mencakup PPK dan PPL, dilaksanakan dengan strategi :



Rencana Kerja Perubahan(RENJA-P) Tahun 2017

- a. mendukung penetapan Kota Masamba sebagai PKL sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan;
 - b. menetapkan kawasan PPK yang melayani skala kabupaten atau beberapa kecamatan; dan
 - c. menetapkan kawasan sebagai PPL yang tersebar di ibu kota kecamatan yang berfungsi untuk mendukung PPK.
- 2). Kebijakan Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi dan sumber daya air yang terpadu dan merata diseluruh wilayah kabupaten, dilaksanakan dengan strategi :
- a. meningkatkan kualitas jaringan prasarana dan mewujudkan keterpaduan pelayanan transportasi darat;
 - b. mendorong pengembangan prasarana telekomunikasi terutama di kawasan daerah tertinggal; dan
 - c. meningkatkan jaringan energi dengan lebih menumbuh kembangkan pemanfaatan sumber daya yang ramah lingkungan dalam sistem kemandirian energi area mikro dan mewujudkan keterpaduan sistem jaringan sumber daya air.
- 3). Kebijakan perlindungan dan pelestarian fungsi dan daya dukung lingkungan, dilaksanakan dengan strategi:
- a. menetapkan kawasan hutan lindung; dan
 - b. meningkatkan fungsi kawasan lindung yang telah menurun akibat pengembangan kegiatan budidaya, dalam rangka mewujudkan dan memelihara keseimbangan ekosistem wilayah;
 - c. mencegah pemanfaatan ruang di kawasan strategis nasional, propinsi maupun kabupaten yang berpotensi mengurangi daya dukung kawasan; dan



Rencana Kerja Perubahan(RENJA-P) Tahun 2017

- d. membatasi dan mencegah pengembangan prasarana dan sarana di dalam dan di sekitar kawasan strategis yang dapat memicu perkembangan kegiatan budidaya.
- 4). Kebijakan pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan/pencemaran lingkungan hidup, dilaksanakan dengan strategi :
- a. menyelenggarakan upaya terpadu untuk melestarikan fungsi sistem ekologi wilayah;
 - b. melindungi dan mengoptimalkan kemampuan lingkungan hidup dari tekanan perubahan dan/atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan agar tetap mampu mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya;
 - c. melindungi dan mengoptimalkan kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan atau komponen lain yang dibuang ke dalamnya;
 - d. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana untuk menjamin kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan;
 - e. mengembangkan kegiatan budidaya yang mempunyai daya adaptasi bencana di kawasan rawan bencana; dan
 - f. mengelola sumber daya alam yang terbaru untuk menjamin ketersediannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamnya.
- 5). Kebijakan perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budidaya, dilaksanakan dengan strategi :
- a. menetapkan kawasan budidaya yang memiliki nilai strategis kabupaten untuk memanfaatkan sumber daya alam di ruang darat,



Rencana Kerja Perubahan(RENJA-P) Tahun 2017

- laut, dan udara, termasuk ruang di dalam bumi secara sinergis untuk mewujudkan keseimbangan pemanfaatan ruang wilayah;
- b. mengembangkan kegiatan budidaya unggulan di dalam kawasan beserta prasarana secara sinergis dan berkelanjutan untuk mendorong pengembangan perekonomian kawasan;
 - c. mengembangkan kegiatan budidaya untuk menunjang aspek politik, pertahanan keamanan, sosial budaya, serta ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
 - d. mengembangkan dan melestarikan kawasan budidaya pertanian pangan untuk mewujudkan ketahanan pangan kabupaten.
- 6). Kebijakan Pengendalian perkembangan kegiatan budidaya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan, dilaksanakan dengan strategi :
- a. membatasi perkembangan budidaya terbangun di kawasan rawan bencana untuk meminimalkan potensi kejadian bencana dan potensi kerugian akibat bencana;
 - b. menumbuhkan kembangkan kawasan agropolitan, agroindustri dan minapolitan pada sentra-sentra produksi unggulan;
 - c. mengembangkan ruang terbuka hijau dengan luas paling sedikit 30% dari luas kawasan terbangun perkotaan;
 - d. Membatasi perkembangan kawasan terbangun di perkotaan untuk mempertahankan tingkat pelayanan prasarana dan sarana kawasan perkotaan serta mempertahankan fungsi kawasan perdesaan sekitarnya.
- 7). Kebijakan Pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan dalam pengembangan perekonomian kabupaten yang produktif, efisien, dan mampu bersaing dalam perekonomian nasional, dilaksanakan dengan



Rencana Kerja Perubahan (RENJA-P) Tahun 2017

strategi :

- a. mengembangkan pusat pertumbuhan berbasis potensi sumber daya alam dan kegiatan budidaya unggulan sebagai penggerak utama pengembangan wilayah;
 - b. menciptakan iklim investasi yang kondusif;
 - c. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung kawasan;
 - d. menjaga dampak negatif kegiatan budidaya agar tidak menurunkan kualitas lingkungan hidup kawasan; dan
 - e. meningkatkan pelayanan prasarana dan sarana penunjang kegiatan ekonomi.
- 8). Kebijakan Pemanfaatan sumber daya alam dan atau perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, dilaksanakan dengan strategi :
- a. mengembangkan kegiatan penunjang dan/atau kegiatan turunan dari pemanfaatan sumber daya dan/atau teknologi tinggi;
 - b. meningkatkan keterkaitan pemanfaatan sumber daya dan/atau teknologi tinggi dengan kegiatan penunjang dan/atau turunannya; dan
 - c. mencegah dampak negatif pemanfaatan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi terhadap fungsi lingkungan hidup dan keselamatan masyarakat.
- 9). Kebijakan peningkatan fungsi kawasan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan Negara, dilaksanakan dengan strategi :
- a. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun disekitar asset-aset pertahanan dan keamanan
 - b. mengembangkan kegiatan budi daya secara selektif di dalam dan di sekitar asset-aset pertahanan untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan; dan



Rencana Kerja Perubahan(RENJA-P) Tahun 2017

- c. turut serta memelihara dan menjaga aset-aset pertahanan dan keamanan negara.

Beberapa faktor yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Koperindag ditinjau dari implikasi RTRW antara lain :

Hambatan :

1. Masih rendahnya sosialisasi RTRW dan KLHS;
2. Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya RTRW dan KLHS;
3. Rendahnya pengendalian dan pengawasan RTRW dan KLHS;
4. Tingginya pelanggaran pemanfaatan ruang dan KLHS;
5. Belum adanya penerapan sanksi terhadap pelanggaran RTRW dan KLHS;
6. Rendahnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya AMDAL.

Pendorong :

1. Adanya Perda Nomor 2 Tahun 2011 tentang RTRW;
2. Adanya Perda Nomor 5 Tahun 2011 tentang RPJPD;
3. Adanya Perda Nomor 8 Tahun 2016 tentang RPJMD;
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

C. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Dari beberapa permasalahan yang ada pada Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Luwu Utara maka dapat dilihat dari Isu-Isu Strategis, saat ini Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah kabupaten Luwu Utara melaksanakan 4 bidang kewenangan yaitu: Bidang Koperasi dan UKM, Bidang Perdagangan, Bidang Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Barang dan Bidang Perindustrian.

Beberapa isu-isu strategis yang ada pada Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Luwu Utara, yakni :



Rencana Kerja Perubahan (RENJA-P) Tahun 2017

1. Bidang Koperasi dan UKM

- a. Masih Kurangnya pengetahuan Aparat dalam Pembinaan Koperasi dan UMKM.
- b. Masih rendahnya Kesadaran masyarakat dalam pengembangan Perkoperasian.
- c. Masih rendahnya SDM Pengurus dan Pengelola Koperasi.
- d. Belum adanya koperasi unggulan disetiap Kecamatan
- e. Lemahnya pengelolaan Manajemen bagi KSP/USP Koperasi.
- f. Kurangnya Pengetahuan Pelaku Usaha dalam menumbuh kembangkan kewirausahaan.
- g. Belum maksimalnya peralatan dan Permodalan bagi UMKM
- h. Kurangnya Pembinaan terhadap UMKM potensial.
- i. Tidak Tersedianya Data UMKM yang akurat.
- j. Masih minimnya Bantuan Modal Kerja bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
- k. Kurangnya produk UMKM yang memiliki standar pasar
- l. Kurangnya Sarana dan Prasarana Pemasaran Bagi Produk UMKM.
- m. Rendahnya keinginan masyarakat untuk cinta produk lokal
- n. Belum adanya regulasi tentang layanan umum permodalan terhadap UMKM dan perusahaan daerah.
- o. Kurangnya Pembinaan Bagi UMKM Penerima Bantuan Dana Bergulir.

2. Bidang Perdagangan

- a. Terbatasnya Pelaku Usaha yang berorientasi ekspor dan memiliki kemampuan mengakses informasi pasar.
- b. Belum optimalnya penataan dan Pengelolaan Pasar Tradisional.
- c. Kondisi sarana dan prasarana penunjang perdagangan belum memadai untuk mendukung kelancaran distribusi barang dan jasa.
- d. Belum adanya regulasi tentang Penataan Pedagang kaki lima dan asongan.
- e. Belum maksimalnya penataan dan pembinaan pedagang
- f. Masih terbatasnya sarana dan prasarana perdagangan di kecamatan



Rencana Kerja Perubahan(RENJA-P) Tahun 2017

- g. Masih terbatasnya kendaraan operasional
- h. Belum maksimalnya pemasaran produk dan komoditi unggulan.
- i. Masih terbatasnya sarana dan prasarana resi gudang.
- i. BIDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN BARANG**
 - a. Masih Kurangnya Pengetahuan SDM Aparat Pengawasan Barang dan Jasa.
 - b. Belum Optimalnya Lembaga Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Barang Beredar.
 - c. Kurangnya tingkat kesadaran produsen dan konsumen tentang tertib niaga dan perlindungan konsumen.
 - d. Masih adanya produk yang beredar di pasaran yang belum memenuhi persyaratan yang berlaku.
 - e. Belum terbentuknya UPTD Kemetrolagian sehingga belum bisa dilakukan tera dan tera ulang sebagai sumber PAD.
 - f. Belum adanya kantor UPTD kemetrolagian sebagai tempat penyimpanan peralatan tera.

4. Bidang Perindustrian

- a. Masih rendahnya kualitas Sumber daya terampil dibidang industri
- b. Masih rendahnya Pertumbuhan Wirausaha Baru di Bidang Perindustrian.
- c. Kurangnya Sarana dan Prasarana Dibidang Perindustrian.
- d. Masih Kurangnya Peralatan yang Memadai bagi Para Pelaku Usaha Industri.
- e. Masih kurangnya produk - produk IKM yang berciri khas lokal.
- f. Masih Rendah kualitas produk IKM.
- g. Masih terbatasnya produk IKM berstandarisasi
- h. Perlunya pemutakhiran Data Potensi Industri yang Akurat setiap tahun.
- i. Belum adanya industri pariwisata (Kampung Komoditi Unggulan)
- j. Belum maksimalnya kerjasama pelaku industri dengan pihak swasta
- k. Perlunya Pembinaan Bagi Industri Rumah Tangga secara berkesinambungan
- l. Perlunya Kawasan Pengembangan industri tahun tempe di Kecamatan Bone-Bone dan Kecamatan Sukamaju.



Rencana Kerja Perubahan (RENJA-P) Tahun 2017

- m. Perlunya kawasan pusat perbelanjaan Meubel
- n. Pengembangan Industri Kapurung Instant

Untuk memperoleh informasi tentang apa saja yang menjadi isu strategis yang akan ditangani melalui renstra Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kab.Luwu Utara di gunakan analisis SWOT.

Analisis lingkungan internal Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Luwu Utara memperhatikan unsur-unsur kekuatan dan kelemahan dan analisis lingkungan eksternal memperhatikan unsur-unsur peluang dan ancaman sebagai berikut :

a. Kekuatan (*Strength*)

1. Tersedianya perda Nomor 4 Tahun 2012 yaitu perubahan Perda Nomor 10 Tahun 2008 Tentang struktur organisasi dan tata kerja Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Luwu Utara.
2. Kuatnya komitmen dan besarnya dukungan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Utara terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan ekonomi kerakyatan .
3. Adanya komitmen pimpinan yang tegas, konsisten dan didukung oleh seluruh staf.
4. Adanya dukungan peraturan sebagai dasar dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

b. Kelemahan (*Weakness*)

1. Data potensi daerah beragam dan belum akurat/memadai
2. Kebanyakan pelaku usaha terbentur masalah permodalan
3. Belum adanya kawasan industri sebagai pusat produksi
4. Pengawasan dan Pemanfaatan teknologi informasi yang relatif masih rendah.
5. Masih banyak produk UMKM yang belum berstandarisasi



Rencana Kerja Perubahan (RENJA-P) Tahun 2017

6. Belum maksimalnya penataan dan pembinaan pedagang

c. Peluang (*Opportunities*)

1. Kebijakan dan kewenangan dalam pembinaan oleh Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
2. Kebijakan Otonomi Daerah
3. Potensi Sumber Daya Alam yang cukup besar
4. Jumlah Koperasi dan UKM cukup Banyak
5. Adanya dukungan Masyarakat luas terhadap program-program dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

d. Tantangan (*Threats*)

1. Kondisi Sosial ekonomi masyarakat masih rendah dan tidak stabil
2. Partisipasi aktif masyarakat dalam pengembangan koperasi masih rendah.
3. Sarana Pemasaran terhadap Produk UMKM masih Kurang.
4. Keterbatasan Modal Berusaha terhadap Pelaku Ekonomi masih kecil.

3.3. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan yang akan direncanakan pada Renja-P tahun 2017 adalah program dan kegiatan yang belum mencapai target dan belum dilaksanakan Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan dalam rumusan Program dan Kegiatan Tahun 2017 adalah tetap mengacu pada :

- Visi dan Misi Luwu Utara yaitu :

Visi “ *Luwu Utara yang Religius dengan Pembangunan Berkualitas dan Merata yang Berlandaskan Kearifan Lokal*”

Misi Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM :



Rencana Kerja Perubahan(RENJA-P) Tahun 2017

1. Meningkatkan Industri kreatif yang berdaya saing tinggi
2. Meningkatkan kualitas Koperasi sebagai penopang perekonomian masyarakat.
3. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia bagi pengelola Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
4. Meningkatkan sarana Infrastruktur pengembangan kawasan industri
5. Fasilitasi pengembangan modal usaha bagi UMKM
6. Pengembangan Industri Kecil Menengah dalam rangka peningkatan ekonomi kerakyatan
7. Meningkatkan Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
8. Meningkatkan nilai transaksi perdagangan dan net ekspor antar daerah.
9. Meningkatkan kontribusi sektor perdagangan dan sektor industri terhadap PDRB.

Dalam Meningkatkan pertumbuhan, produktifitas dan Pengembangan potensi pusat-pusat perekonomian daerah Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM untuk tahun 2017 melakukan beberapa usulan program/kegiatan. Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM untuk tahun 2017 mengusulkan program sebanyak 18 Program dan 45 kegiatan dengan rincian 6 Program rutin dan 12 Program teknis dengan 18 kegiatan rutin dan 37 kegiatan Teknis dengan Total Pagu Anggaran Sebesar Rp. 17.271.222.500,-. Program dan Kegiatan yang diusulkan sesuai dengan dokumen perencanaan yang tertuang di dalam RPJMD, Renstra, Renja-P, RKPD dan Usulan pemangku kepentingan melalui Musrenbang Desa, Kecamatan dan Kabupaten, dan Propinsi. Untuk jelasnya dapat dilihat pada Tabel. 5 berikut :



TABEL 5
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN
TAHUN 2017 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018
KABUPATEN LUWU UTARA

SKPD : DINAS KOPERINDAG

KODE								Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana-P Tahun 2017				CATATAN PENTING	Prakiraan Rencana Tahun 2018			
										Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1								2	3	4	5		6	7	8	9		10
3 06 3 06 01 01								Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran									
3 06			3 06		01	01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Terkirim	Dinas Perdinkop	3000	Pucuk	1,000,000	APBD		3000	Pucuk	1,000,000
3 06			3 06		01	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah pembayaran tagihan telepon/internet	Dinas Perdinkop	1	Paket	5,330,340	APBD		1	paket	8,000,000
3 06			3 06		01	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan operasional yang diservice	Dinas Perdinkop	5	unit	8,681,000	APBD		5	unit	17,000,000
									Jumlah Kendaraan dinas Operasional yang dibayarkan perizinannya	Dinas Perdinkop	5	unit				5	unit	
3 06			3 06		01	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah bahan kebrsihan kantor yang dibeli	Dinas Perdinkop	25	jenis	12,000,000	APBD		100	%	12,000,000
									Jumlah cleaning service		1	org				1	org	
3 06			3 06		01	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen alat-alat listrik yang dibeli	Dinas Perdinkop	20	Jenis	8,250,000	APBD		20	Jenis	8,250,000

1							2	3	4	5		6	7	8	9		10
3	06	3	06	01	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah koran berlangganan	Dinas Perdinkop	8	koran	12,760,000	APBD		10	Jenis	12,760,000
								Jumlah buku-buku perundang undangan		6	buku				8	buku	
3	06	3	06	01	01	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Aparat yang mengikuti Rapat Koordinasi dan Konsultasi.	Luar Daerah Dalam Propinsi dan Luar Propinsi	46	pegawai	317,000,000	APBD		46	peg	167,100,000
3	06	3	06	01	01	19	Penatausahaan Keuangan, Administrasi Kepegawaian , Ketatausahaan dan Asset	Jumlah dokumen administrasi keuangan,kepegawaian ,ketatausahaan dan asset	Dinas Perdinkop	4	dok	450,000,000	APBD		4	dok	279,600,000
3	06	3	06	01	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Pelayanan Kepegawaian									
3	06	3	06	01	02	09	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah peralatan kantor yang dibeli	Dinas Perdinkop	Printer 2, Laptop 2 , Televisi 1	unit	31,350,000	APBD		AC 2, Deskbook 2, Printer 2	unit	35,000,000
3	06	3	06	01	02	10	Pengadaan Meubeler			3 kursi eselon IV	unit	24,232,000			3	bh	11,600,000
3	06	3	06	01	02	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung/kantor yang dirawat	Dinas Perdinkop	1	unit	60,462,500	APBD		1	unit	18,000,000
3	06	3	06	01	02	24	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dirawat	Dinas Perdinkop	5 motor dan 3 mobil	unit	16,000,000	APBD		5 motor dan 3 mobil	unit	20,000,000
3	06	3	06	01	02	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dirawat	Dinas Perdinkop	Komputer 5, laptop 5, 8 AC	unit	11,648,000	APBD		Laptop 7, Deskbook 2, printer 7, AC 7	unit	12,000,000

1						2	3	4	5		6	7	8	9		10
3	06	3	06	01	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur										
3	06	3	06	01	03	01	Pengadaan mesin/kartu absensi	Jumlah Peralatan Absensi yang dibeli	Dinas Perdinkop	1	paket	10,000,000	APBD	-	-	-
3	06	3	06	01	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kualitas SDM Aparatur									
3	06	3	06	01	05	03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah aparat yang mengikuti Bimtek	Dinas Perdinkop	46	pegawai	103,640,200	APBD	46	pegawai	65,000,000
3	06	3	06	01	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersedianya laporan capaian kinerja dan keuangan daerah									
3	06	3	06	01	06	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen yang disinkronkan	Dinas Perdinkop	2	dok	13,630,000	APBD	5	dok	2,092,000
3	06	3	06	01	06	06	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	Jumlah dokumen Perencanaan yang disinkronkan	Dinas Perdinkop	10	dok	71,590,960	APBD			42,850,000
3	06	3	06	01	09	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan	Terlaksananya Pelayanan Kedinasan									
3	06	3	06	01	09	04	Kunjungan Kerja Bersama Bupati/Wakil Bupati/DPRD/Muspida/Pejabat Pemerintah tingkat atas/unit kerja terkait	Jumlah pegawai yang melaksanakan kunjungan kerja	Luwu Utara	46	pegawai	117,663,500	APBD	46	pegawai	100,700,000
2	11	3	06	01	15	Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif										
2	11	3	06	01	15	01	Penyusunan kebijakan tentang Usaha Kecil Menengah	Kab. Luwu Utara	Jumlah Perda yang terbit	1	Ranperda/Perda Perusda	78,275,000	APBD	-	-	-

1							2	3	4	5		6	7	8	9		10
2	11	3	06	01	16		Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UMKM										
2	11	3	06	01	16	06	Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan	Se Kab. Luwu Utara	Jumlah SDM UMKM yang dilatih	30	UMKM	43,690,000	APBD		100	UMKM	125,250,000
2	11	3	06	01	17		Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM										
2	11	3	06	01	17	05	Pemantauan, Pengelolaan Penggunaan Dana Pemerintah Bagi UMKM	Kab.Luwu Utara	Jumlah Dana Bergulir yang dikembalikan oleh UMKM	102	UMKM	62,405,500	APBD		80	klp	35,550,000
									Jumlah UMKM yang dibina	120	UMKM				80	klp	
2	11	3	06	1	17	06	Pengembangan Sarana Pemasaran Produk Usaha Mikro Kecil Menengah	Kab. Luwu Utara		30	UMKM	-	APBD		30	UMKM	54,700,000
2	11	3	06	01	17	09	Penyelenggaraan Promosi Produk UMKM	Kab.Lutra, Prov.Sul-Sel dan Luar Prov.Sul Sel	Jumlah Produk UMKM yang di Promosikan	25	produk	105,260,000	APBD		26	produk	71,950,000
2	11	3	06	01	18		Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi										
2	11	3	06	01	18	05	Pembinaan, Pengawasan, dan Penghargaan Koperasi Berprestasi	Kab.Luwu Utara	Jumlah Koperasi yang mendapatkan Pembinaan	238	KOP	86,192,000	APBD		227	KOP	70,150,000

1							2	3	4	5		6	7	8	9		10
										185	KopAktif				190	KopAktif	
3	07	3	06	01	17		Peningkatan Kemampuan Tehnologi Industri										
3	07	3	06	01	17	01	Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri	Kec. Masamba, Mappedeceng, Sukamaju, Malangke, Malbar	Jumlah IKM yang dilatih pengolahan yang berbasis pangan	50	IKM	100,146,000	APBD		50	IKM	82,106,000
3	07	3	06	01	17	02	Pengembangan dan Pelayanan Teknologi Industri	Mappedeceng, Sukamaju, Tanalili, Malangke, Malbar	Jumlah IKM yang mendapatkan Pendampingan	25	IKM	70,200,000	APBD		25	IKM	-
2	07	1	15	01	15		Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi										
2	07	1	15	01	15	04	Pengembangan Kapasitas Pranata Pengukuran, Standarisasi, pengujian dan kualitas	9 Kec	Jumlah IKM yang berstandarisasi sertifikat halal	10	IKM	68,920,000	APBD		10	IKM	66,050,000
2	07	1	15	01	15	06	Penguatan Kemampuan Industri Berbasis Teknologi	9 Kec	Jumlah IKM yang dilatih pengolahan pasca panen	30	IKM	-	APBD		0	IKM	-

1							2	3	4	5		6	7	8	9		10
2	07	1	15	01	16		Pengembangan Industri Kecil Menengah										
2	07	1	15	01	16	02	Fasilitasi Bagi Industri Kecil dan Menengah terhadap pemanfaatan sumber daya	Sabbang, Mappedeceng, Bone-Bone, Tanalili, Malbar, Malangke, Masamba, Baebunta, Rampi, Seko, Masamba	Rasio IKM yang memenuhi kualifikasi untuk dibantu (100 IKM yang memenuhi kualifikasi)	10	klp	180,123,750	APBD	Rasio IKM yang memenuhi kualifikasi untuk dibantu (100 IKM)	10	klp	30,000,000
									Jumlah klp pengrajin yang difasilitasi oleh pemerintah	2	IKM				2	IKM	
2	07	1	15	01	16	04	Pemberian Kemudahan Izin Usaha Industri Kecil dan Menengah	Kab.Luwu Utara	Jumlah Industri yang telah didata	60	IKM	58,000,000	APBD		70	IKM	49,000,000
2	07	1	15	01	16	06	Fasilitasi kerjasama kemitraan Industri mikro, kecil menengah dengan swasta	Kab.Luwu Utara	Jumlah IKM yang bermitra dengan swasta	3	IKM	43,500,000	APBD		3	IKM	41,750,000
3	06	3	06	01	15		Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan										
3	06	3	06	01	15	01	Koordinasi peningkatan hubungan kerja dengan lembaga perlindungan konsumen	Kab.Luwu Utara	Terbentuknya BPSK	1	Paket	91,415,000	APBD				-
3	06	3	06	1	15	02	Penyelesaian Permasalahan-Permasalahan Pengaduan Konsumen	Kab.Luwu Utara	Jumlah Kasus yang diselesaikan				APBD		5	Kasus	31,400,000

1							2	3	4	5		6	7	8	9		10
							Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa	9 Kecamatan	Persentase penurunan barang kadaluarsa	15	%	100,009,300	APBD		53	Jenis	52,600,000
3	06		3	06	01	15	03						APBD		8	Kec	
									Jumlah barang kadaluarsa yang diawasi	8	Kec						
							Operasionalisasi dan Pengembangan UPT Kemetrolagian Daerah	9 Kec.	Jumlah Peralatan UTTP Kemetrolagian yang ditera	2550	unit	165,218,700	APBD		2550	unit	89,200,000
3	06		3	06	01	15	04										
3	06		3	06	01	18	Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri										
							Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/Produk	Kec. Bone-Bone dan Tanalili	Jumlah Pasar Tradisional yang dibangun	3	unit	3,274,019,550	DAK/APBD		2	unit	746,799,250
3	06		3	06	01	18	03										
									Jumlah Penimunan pasar	1	Paket						
							Pengembangan Pasar Lelang Daerah	Kab. Luwu Utara	Jumlah Pengusaha dan Kelompok Tani yang mengikuti Pasar lelang	10	poktan	52,289,000	APBD		10	poktan	217,550,000
3	06		3	06	01	18	05										
							Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	9 Kecamatan	Jumlah data pasar	41	pasar	170,655,500	APBD		10	Pasar	165,555,500
2	06	1	15	01	18	06											

1							2	3	4	5		6	7	8	9		10
								Jumlah kebutuhan pokok yang didata	4 pasar	23	jenis		APBD		23	Jenis	
								Jumlah pedagang yang didata		2000	pdg		APBD		2000	pdg	
3	06	3	06	01	18	07	Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (Pasar Murah)	Jumlah Paket Pasar Murah	Luwu Utara	2000	paket	72,936,000	APBD		2000	paket	72,450,000
3	07	3	06	1	18		Penataan Struktur Industri										
3	07	3	06	1	18	02	Penyediaan Sarana Maupun Prasarana Kluster Industri	Kab. Luwu Utara							2	Unit	196,400,000
												6,098,493,800					3,011,412,750
							JUMLAH										

KEPALA DINAS,

Drs. H.MUSLIM MUCHTAR,M.Si

Pangkat : Pembina TK.I

NIP : 19671212198908 1 002

BAB. IV PENUTUP

Rencana Kerja (Renja-P) Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Luwu Utara disusun sebagai Implementasi komitmen seluruh Aparatur Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM untuk mewujudkan visi dan misi yang menitikberatkan pada peningkatan Pembangunan, Peningkatan Ekonomi Kerakyatan, Pengembangan Koperasi, UKM dan IKM, Pelayanan dan Sumber Daya Manusia (SDM). Apabila dalam perjalanan terjadi perubahan situasi dan kondisi yang dapat mempengaruhi Pelaksanaan Renja-P Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM dapat ditinjau kembali dan dilakukan perbaikan ataupun perubahan.

Capaian Kinerja out come Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM hingga tahun 2017 2 tahun pelaksanaan RPJMD dan Resntra 2016 s/d 2021 mencapai 48,81 % sedangkan capaian out put mencapai 75,06 % dengan rata-rata kriteria capaian sangat tinggi.

Dan diharapkan pula dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2017 dapat mensinergikan dengan program dan kegiatan kabupaten dan stakeholder-stakeholder yang lain yang mendukung pada pembangunan di Kabupaten Luwu Utara.

Kemiskinan masih menjadi isu penting yang perlu penanganan di Kabupaten Luwu Utara, berbagai upaya dilakukan dalam menekan laju kemiskinan.



Komitmen Pemerintah Kabupaten Luwu Utara memberdayakan masyarakatnya adalah salah upaya untuk bisa mengurangi angka kemiskinan yang ada di Luwu Utara. Sebagaimana dalam RPJMD Kabupaten Luwu Utara telah menargetkan hingga tahun 2017 mendatang angka kemiskinan di Luwu Utara akan berkurang 15 persen itu berarti bahwa angka kemiskinan hingga akhir tahun 2017 $\pm$ 8.5 % .

Dalam rangka penurunan angka kemiskinan tersebut Pemerintah Kabupaten Luwu Utara membentuk tim identifikasi upaya penanggulangan kemiskinan, serta melakukan advokasi bagaimana formulasi dalam upaya penanggulangan kemiskinan di masyarakat.

Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Satuan Kerja Perangkat Daerah juga berperan sangat penting dalam upaya pengentasan kemiskinan. Salah satu wujud peranan Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM dalam penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Luwu Utara adalah membentuk program Fasilitasi Modal Usaha Melalui Pola Kemitraan, Pasar Murah, Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan, Pasar online dan Pemasaran Melalui retail modern, Koperasi Lembaga Ekonomi Pengembangan Pesisir (LEPP), KUR (kerjasama dengan pihak perbankan) yang berupa pemberian pinjaman modal usaha dengan bunga yang sangat rendah bahkan tanpa bunga.

Dalam kaitan itu, maka DPRD bersama dengan masyarakat perlu memberi dukungan sepenuhnya agar program-program tersebut dapat direalisasikan



secara optimal dan mencapai sasaran karena keberhasilan pelaksanaan Renja tahun 2017 sangat tergantung pada sikap mental, tekad, semangat, ketaatan, keinginan untuk maju dan disiplin dari semua pihak.

Masamba, Juni 2017
KEPALA DINAS,

Drs. H. MUSLIM MUCHTAR, M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19671212 198908 1 002

